



KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2010

Paparan Menteri Keuangan

Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI

1 Juni 2009

Bahan dapat di akses di : www.fiskal.depkeu.go.id





Outline

- Pendahuluan: Dasar Hukum
- Pertumbuhan Perekonomian dan Perdagangan Dunia
- Perekonomian Indonesia 2004-2008 dan 2009
- Kerangka Ekonomi Makro 2010
- Kebijakan Fiskal, 2004-2008 dan 2009
- Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, 2010
- Jadwal Pembahasan PPKF dan RAPBN 2010



Pendahuluan: Dasar Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 13:

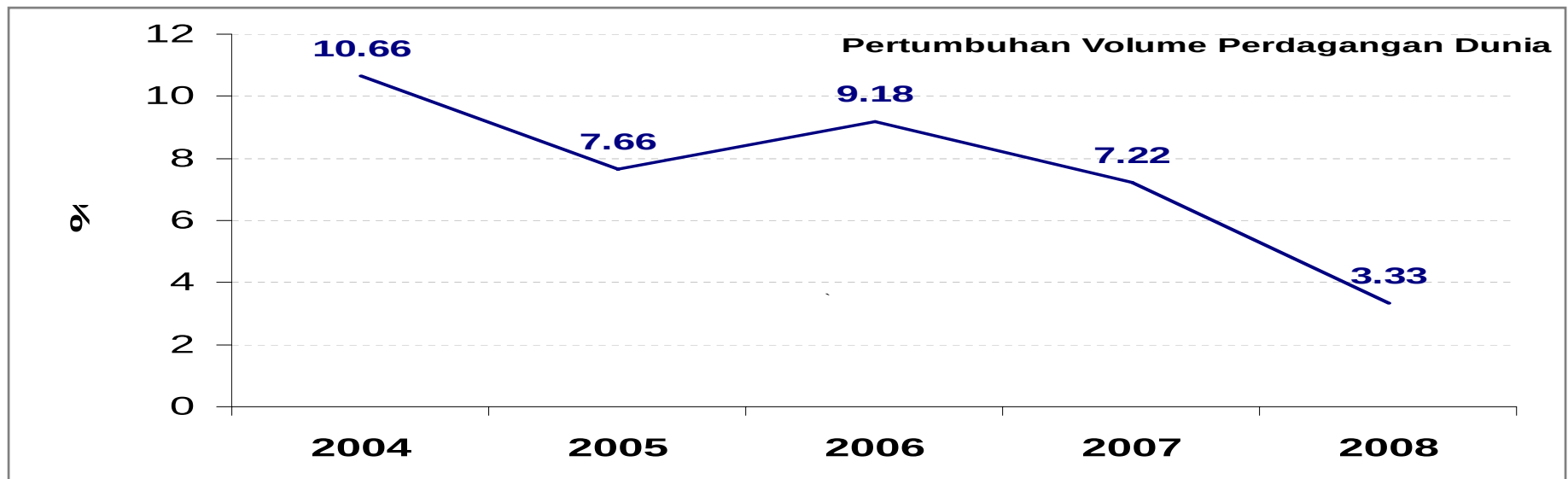
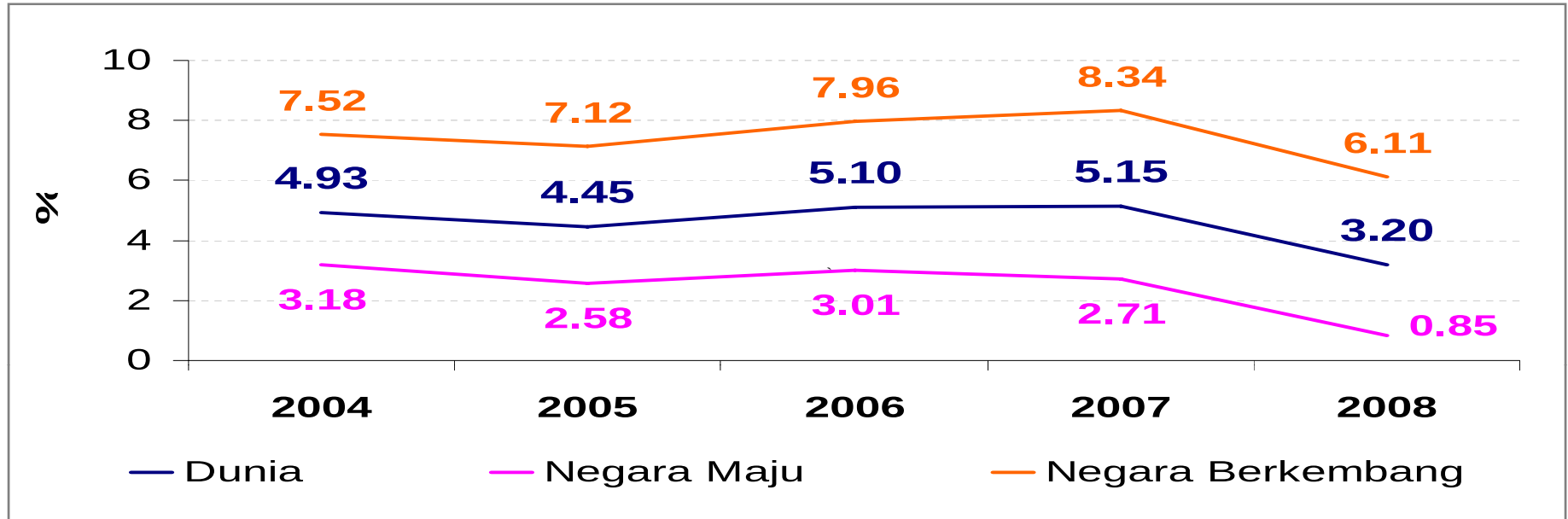
- (1) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro TA berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.



Perekonomian dan Perdagangan Dunia 2004 - 2008



Pertumbuhan Ekonomi Global Mulai Melambat di 2008

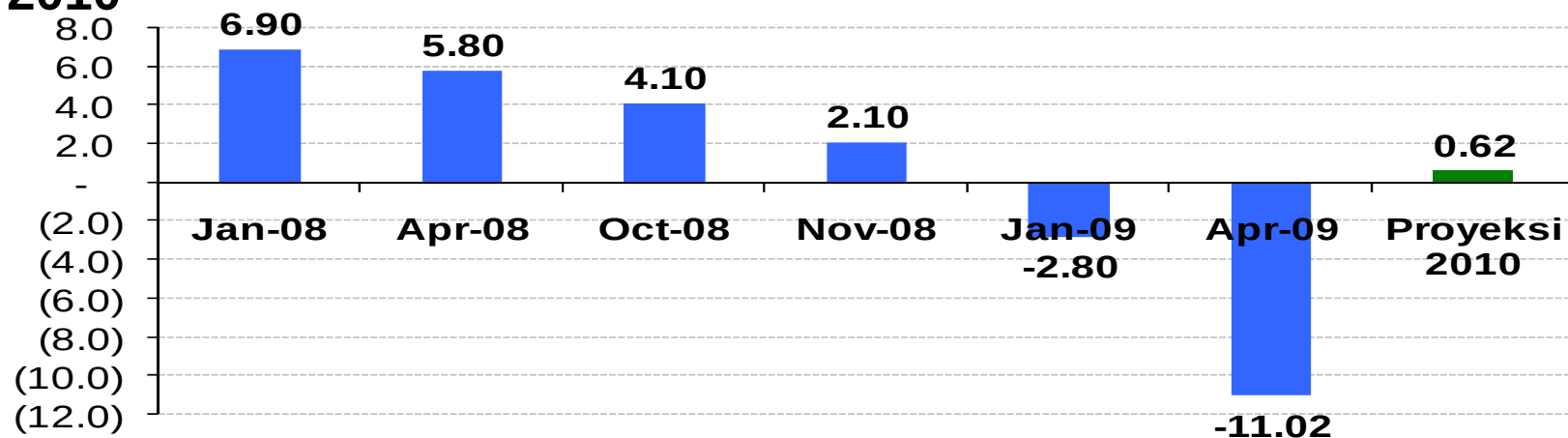




Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Global memasuki resesi 2009 dan pemulihan 2010

Perkiraan Pertumbuhan PDB 2009 & 2010					
	Jan -08	Oct -08	Jan -09	Apr-09	2010p
World	4.4	3.0	0.5	-1.3	1.9
USA	1.8	0.1	-1.6	-2.8	0.0
Europe	1.9	0.2	-2.0	-4.2	-0.4
Japan	1.7	0.5	-2.6	-6.2	0.5
China	10.0	9.3	6.7	6.5	7.5
India	8.2	6.9	5.1	4.5	5.6
ASEAN-5	6.2	4.9	2.7	0.0	2.3
Indonesia	6.4	6.0	4.5	2.5	3.5

Proyeksi Pertumbuhan Perdagangan Negatif di 2009 dan Mulai Positif di 2010

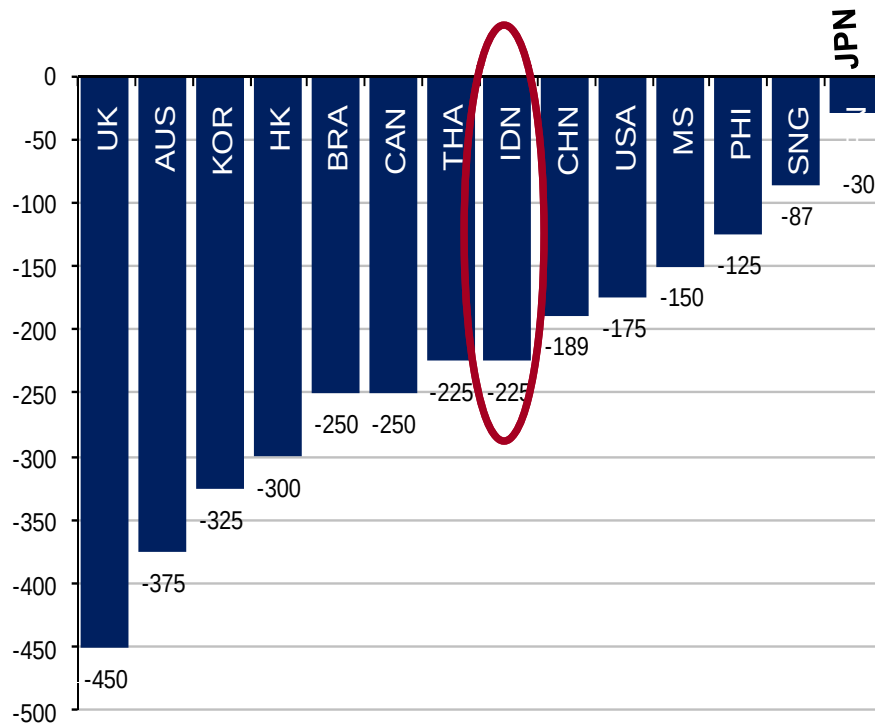




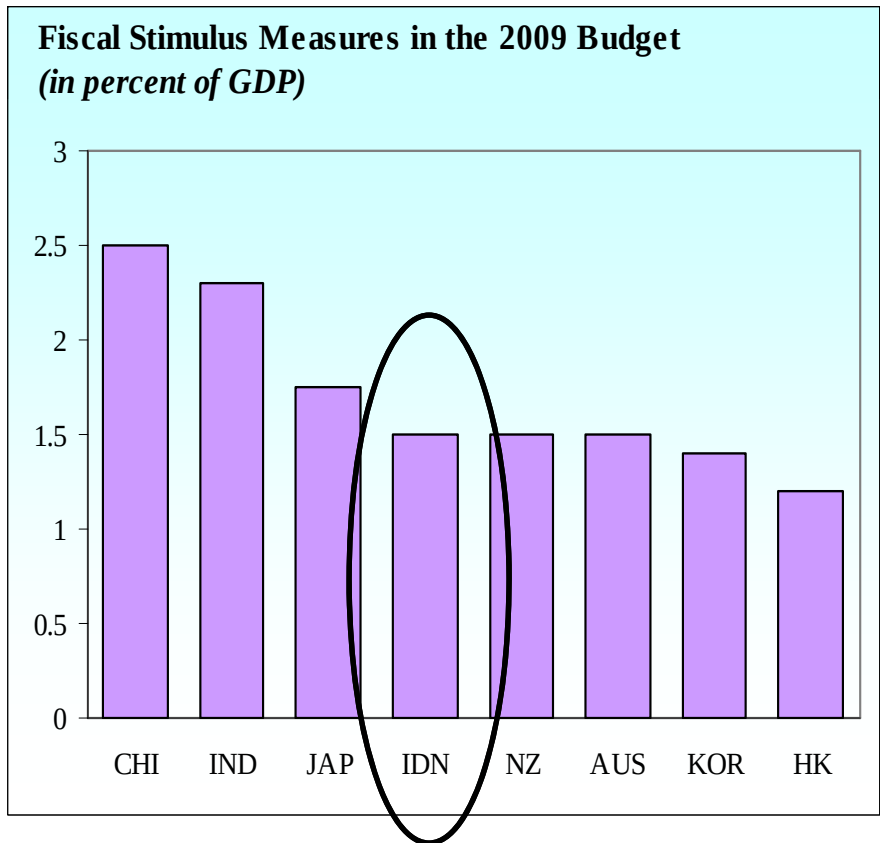
Negara-Negara di Dunia melakukan mitigasi krisis melalui Penurunan suku bunga dan stimulus fiskal

- Penurunan BI rate seiring dengan menurunnya tingkat inflasi.

Penurunan BI rate sebesar 225 bps sejak Sep 2008



- Stimulus fiskal APBN 2009 sebesar 1,4 % of GDP

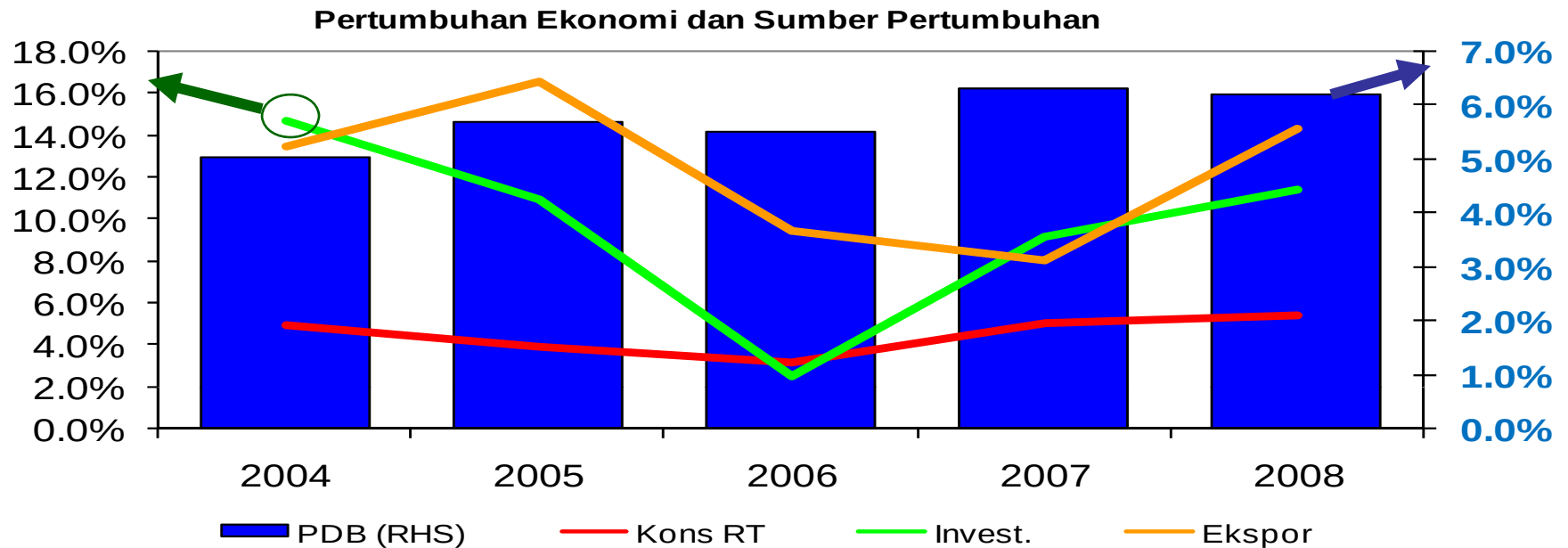




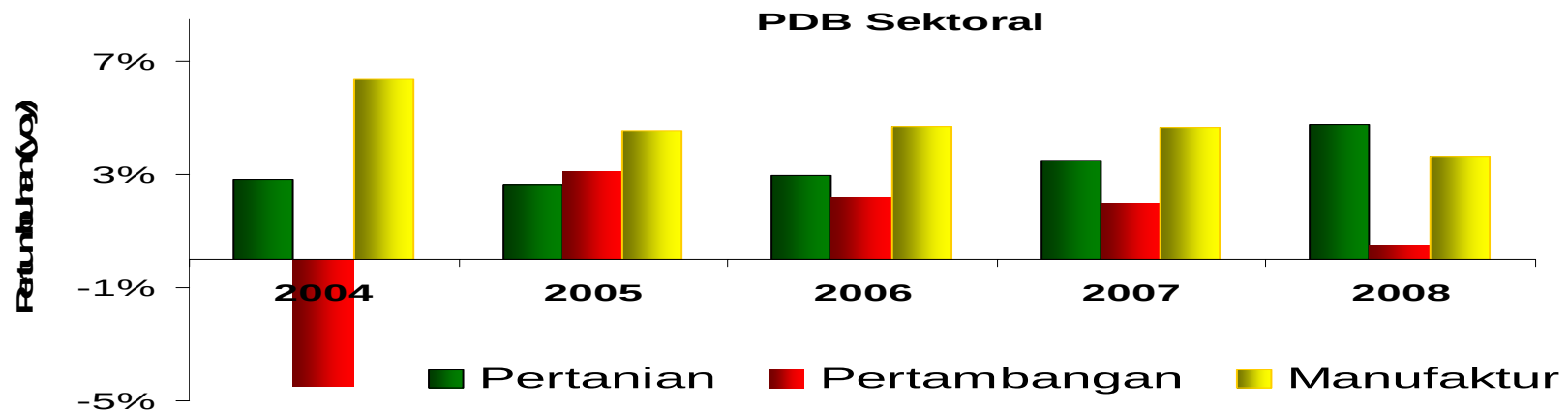
Perekonomian Indonesia 2004 - 2008



Pertumbuhan Ekonomi tinggi didukung oleh Konsumsi, Investasi dan Ekspor

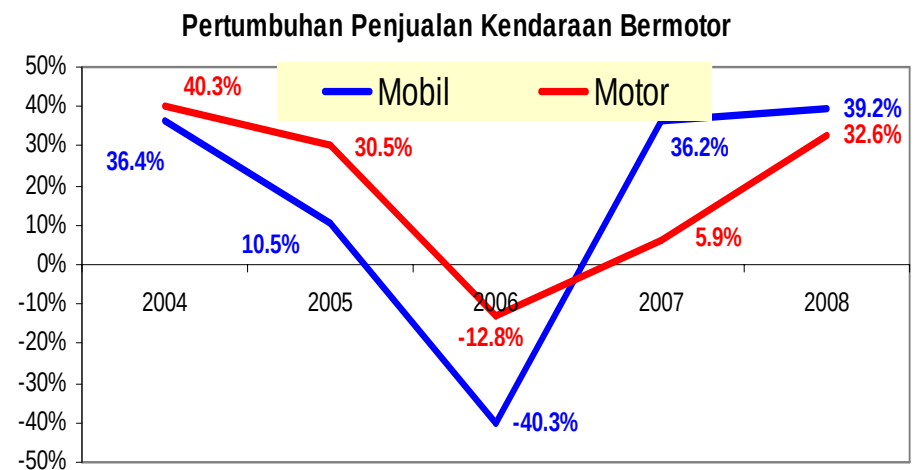
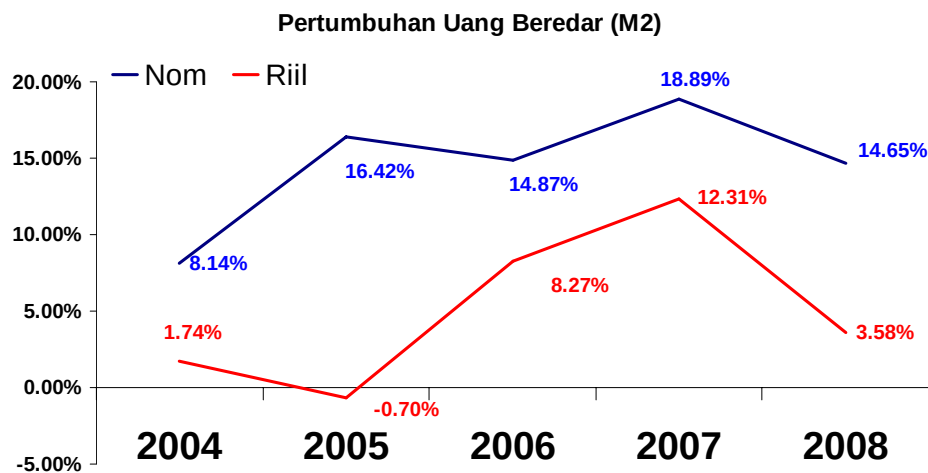
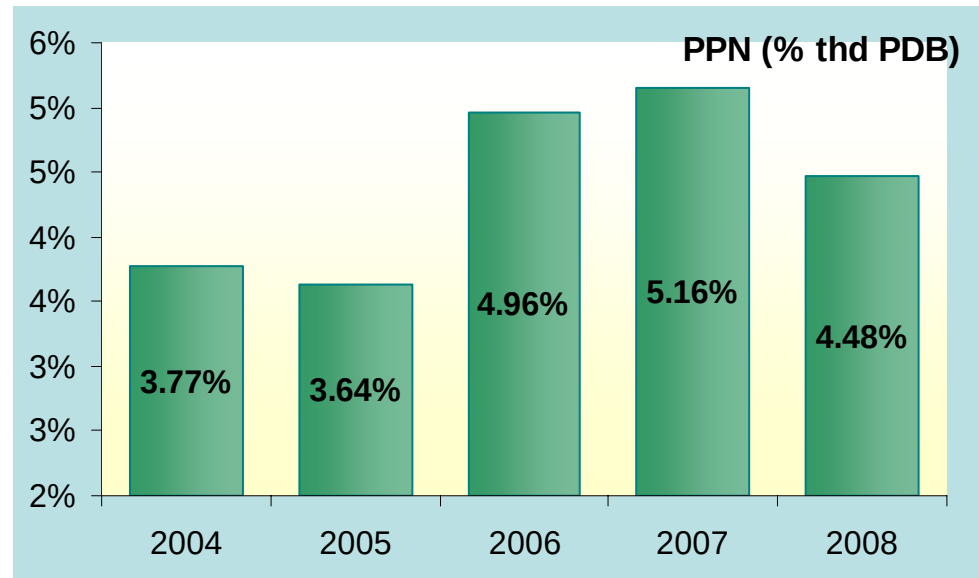
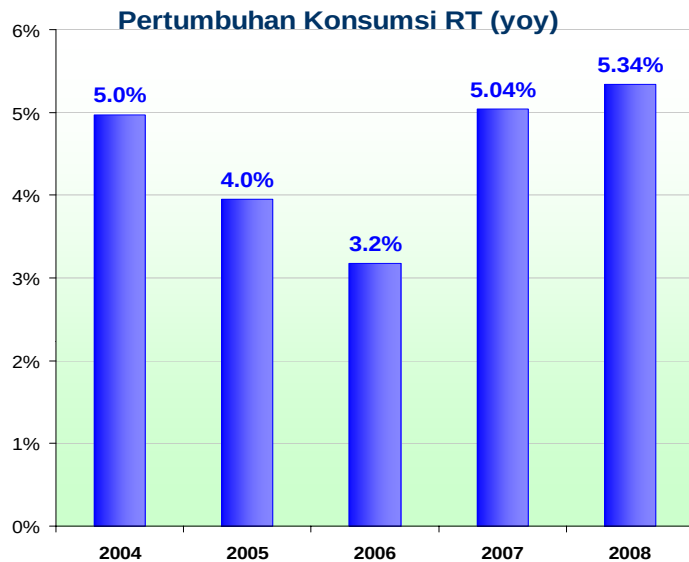


Sektor Pertanian meningkat, pertambangan menurun, Manufaktur mulai menurun sejak 2006



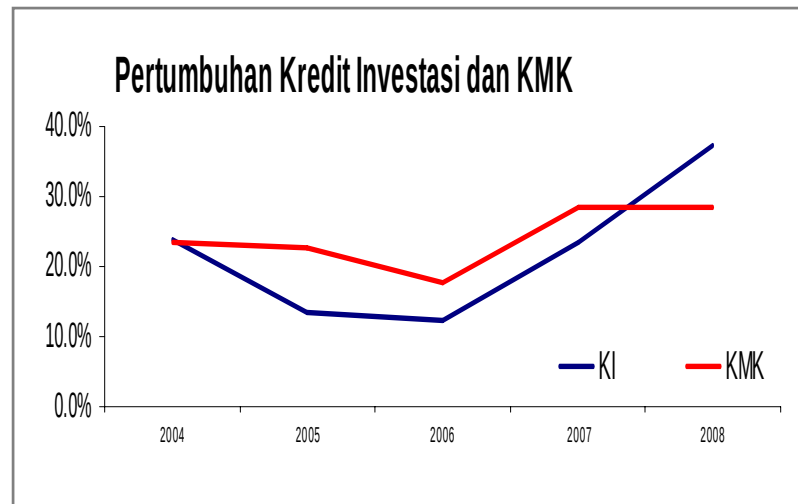
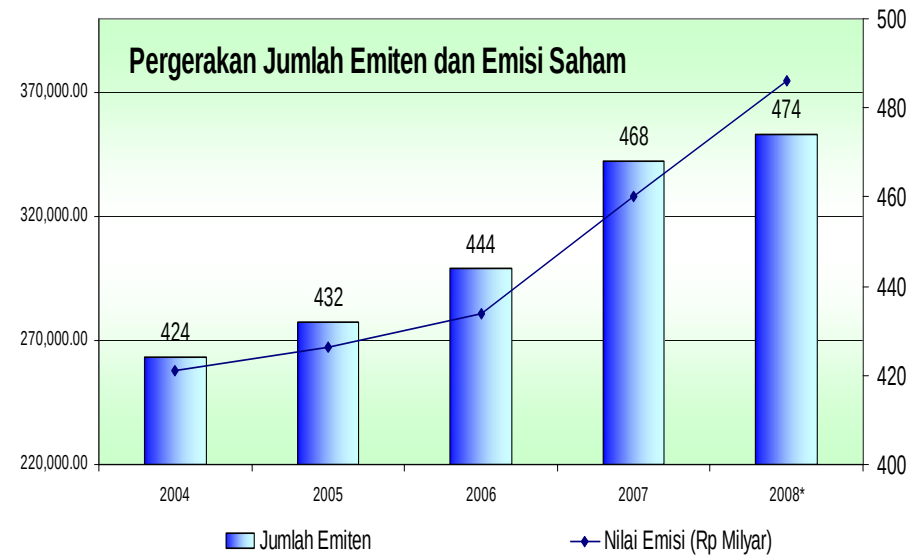
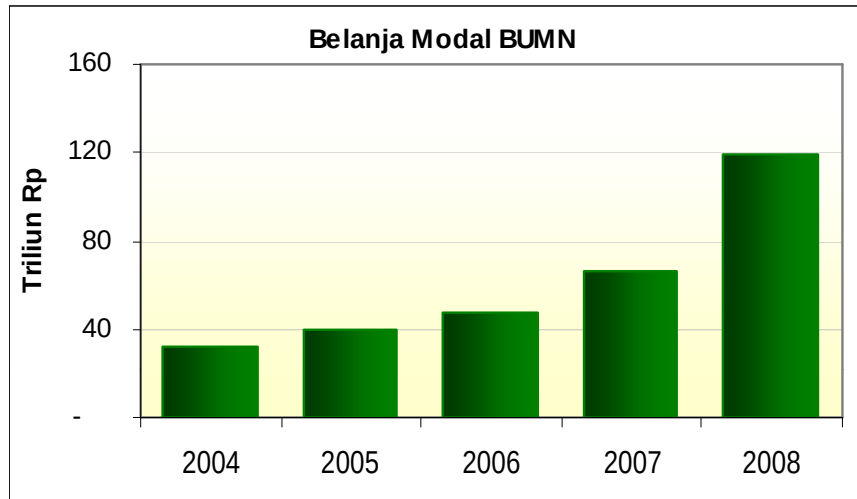


Konsumsi Rumah Tangga tetap kuat meskipun 2008 terlihat menurun akibat peranan investasi dan ekspor





Investasi meningkat dengan dana dari sumber swasta

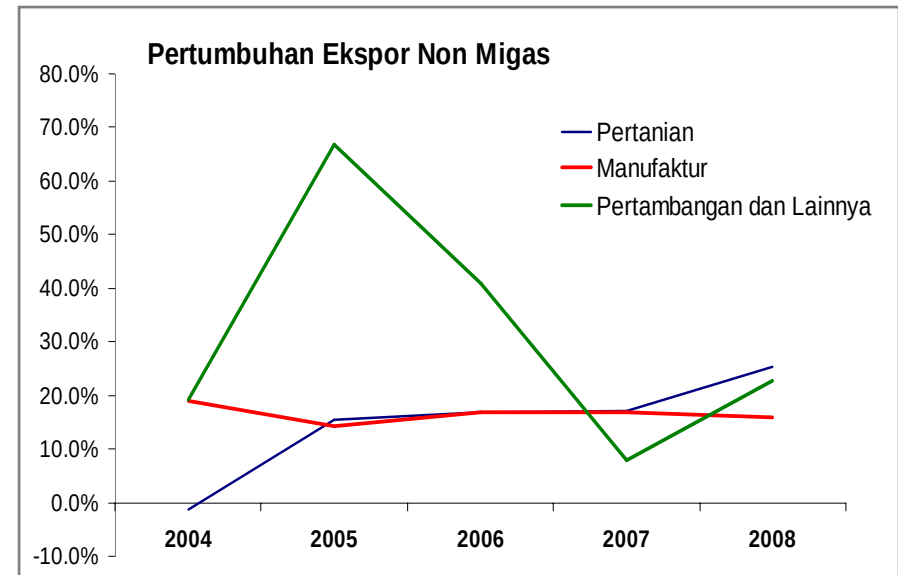
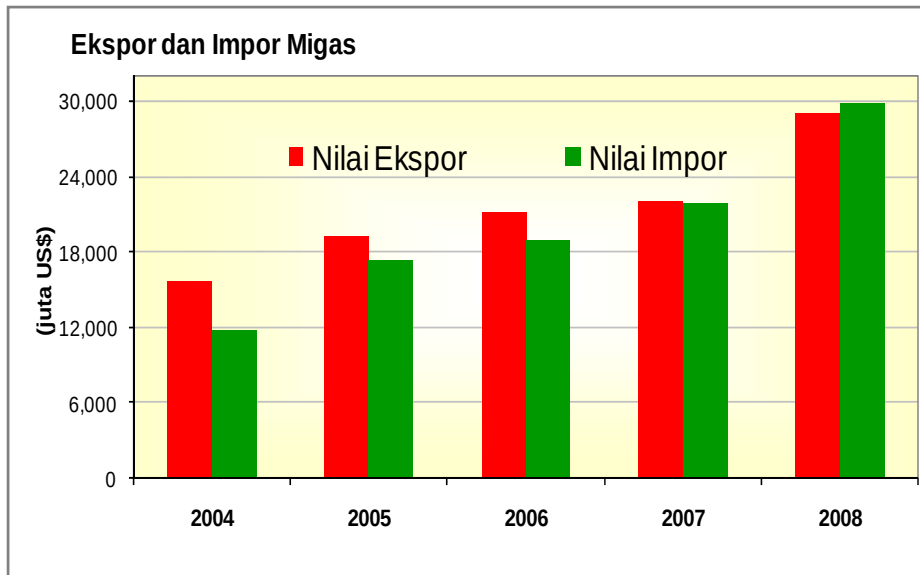
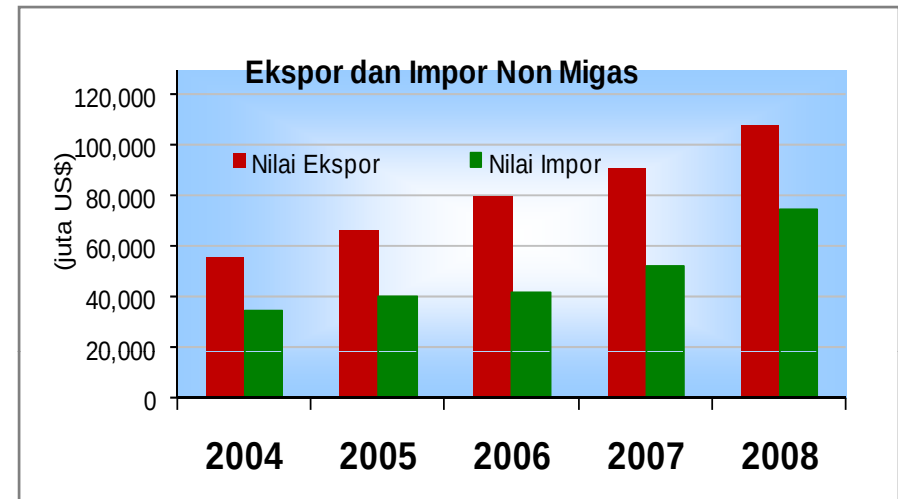
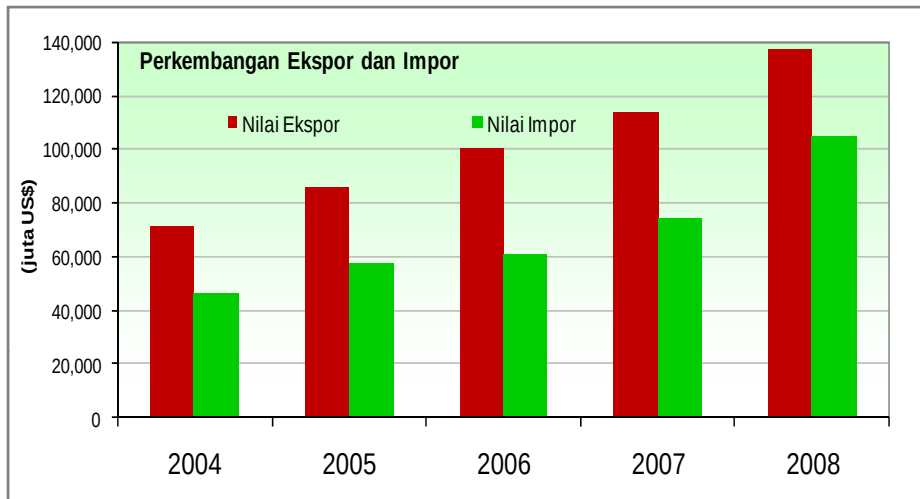


Laba Ditahan Swasta Nasional (Rp triliun)

	2005	2006	2007	2008
Laba Bersih	255,412	128.90	140.70	197.0
Laba Ditahan	76,624	38.67	42.21	59.10

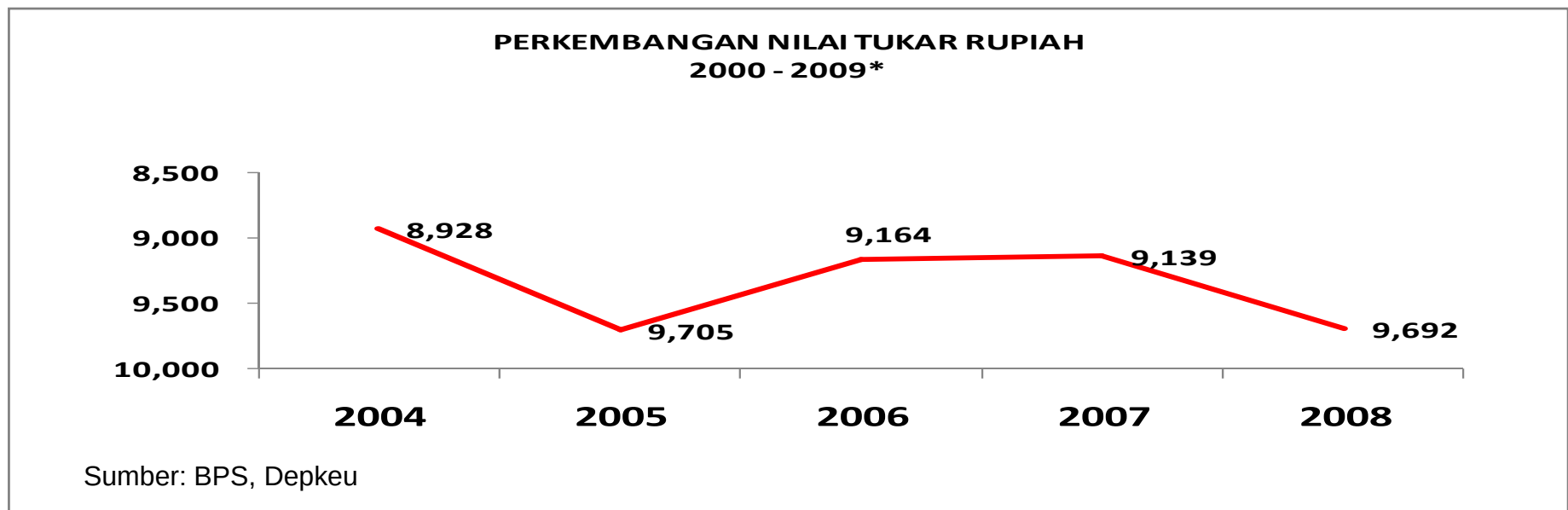
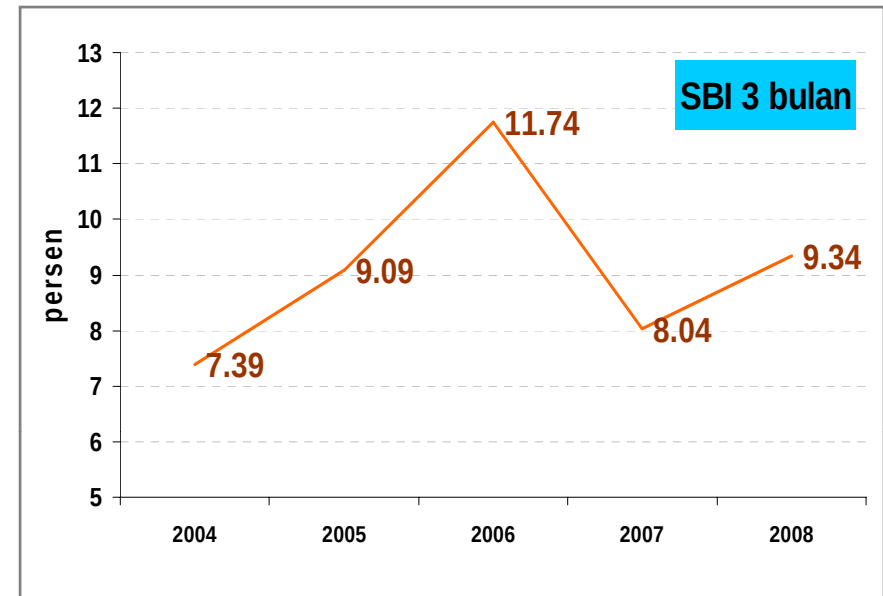
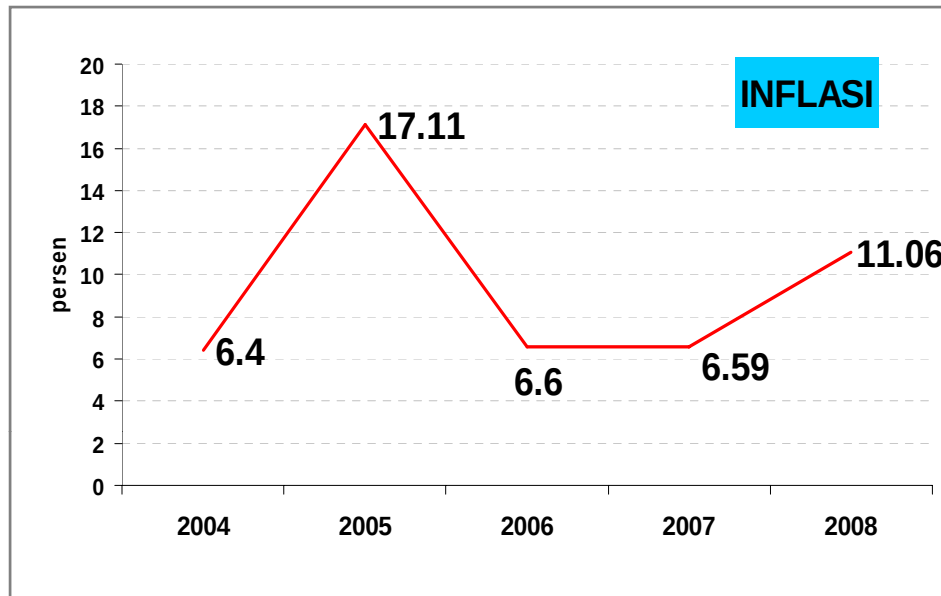


Perdagangan meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan harga komoditas



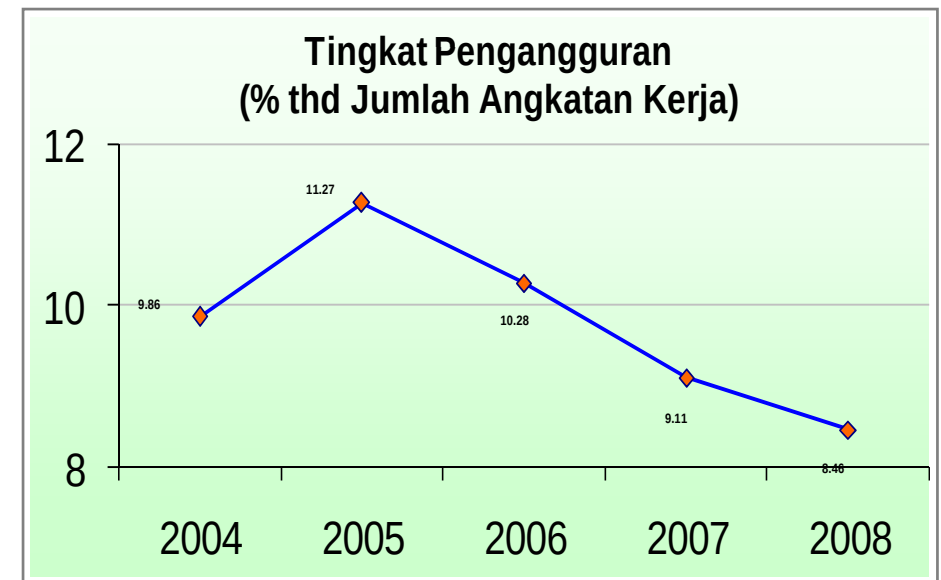
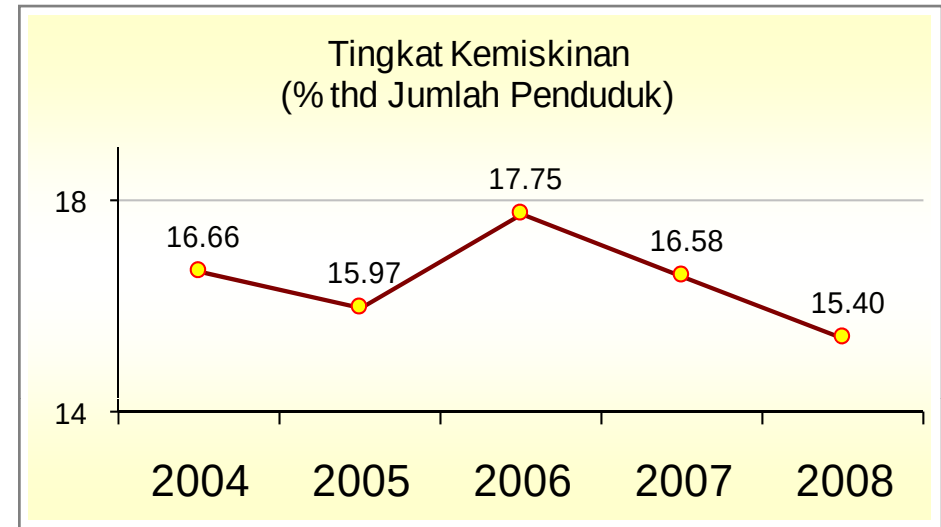
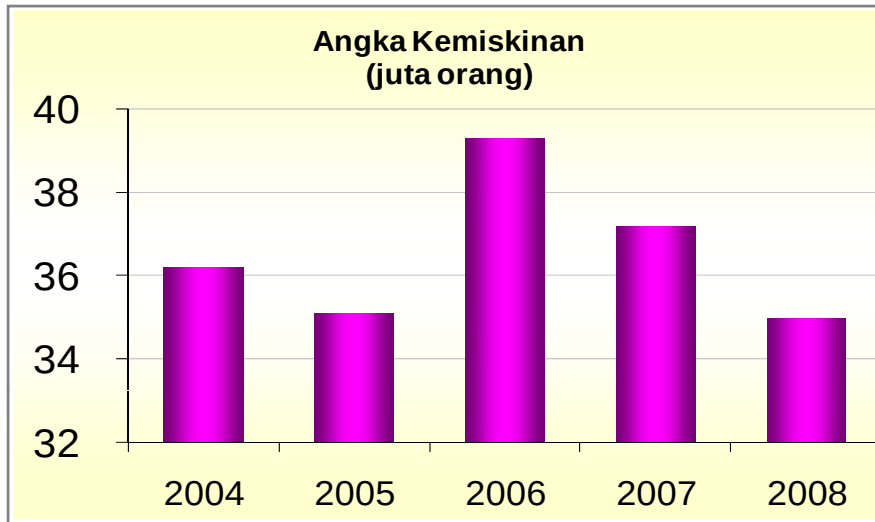


Tingginya harga komoditas dan krisis global memberikan tekanan pada inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga





Kemiskinan dan Pengangguran menurun walaupun terdapat tekanan Krisis Global

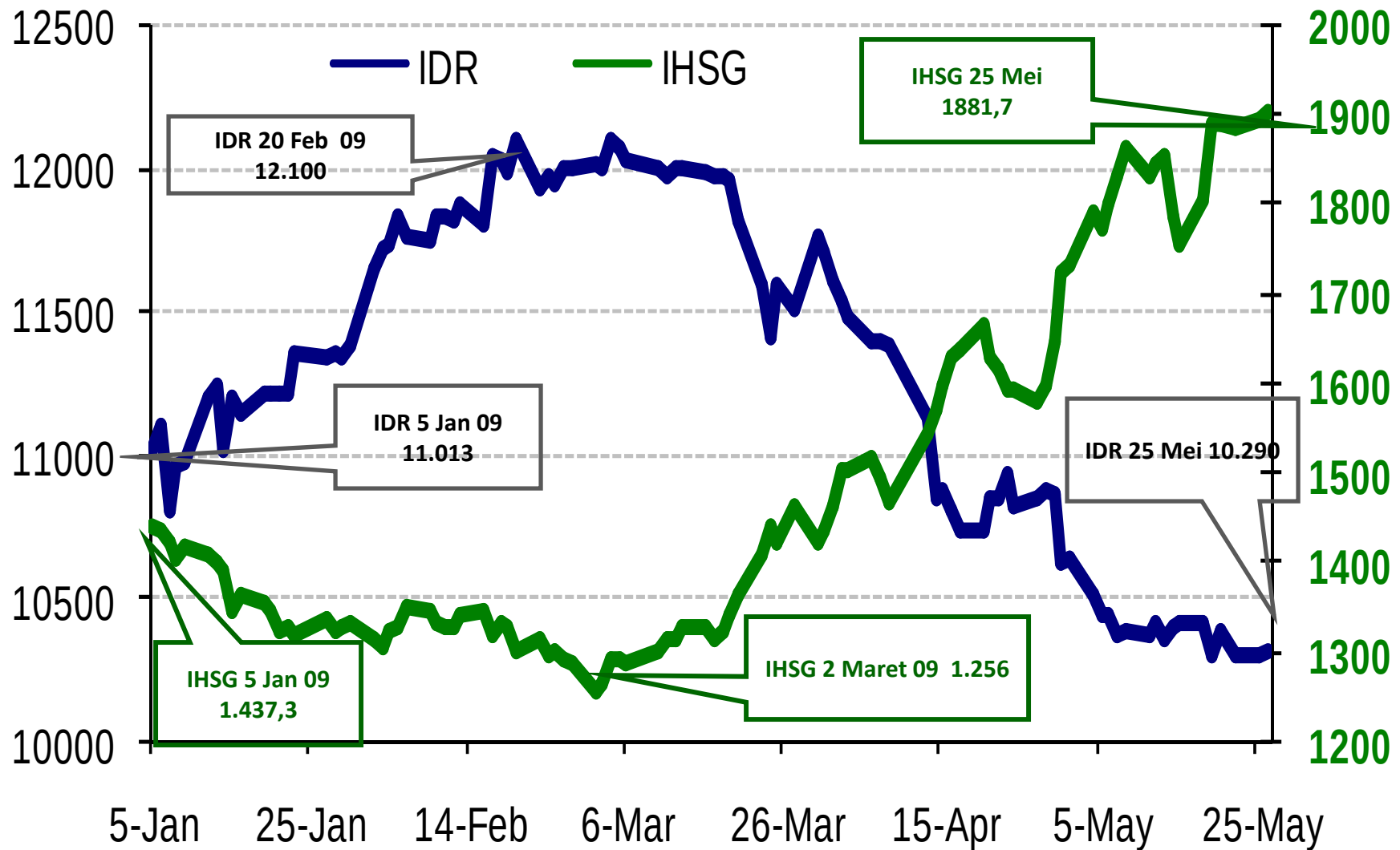




Pekonomian Indonesia 2009



Kinerja Nilai Tukar dan IHSG semakin membaik..

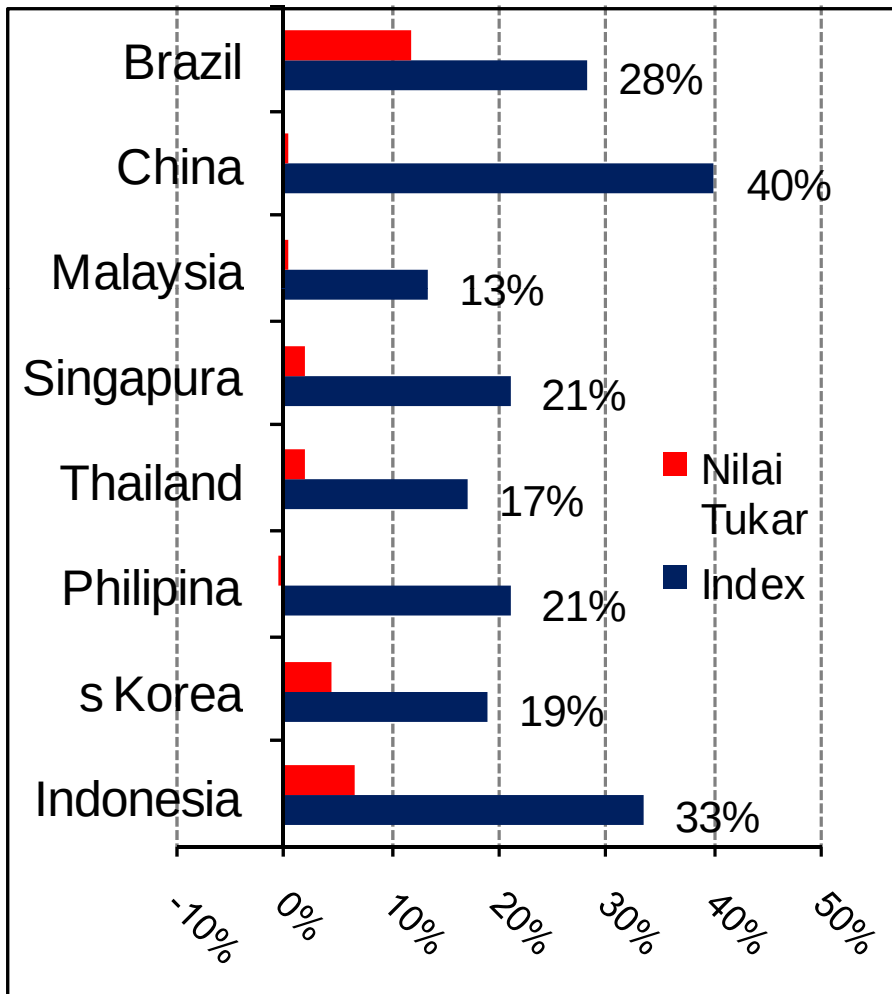


Sumber : Bloomberg



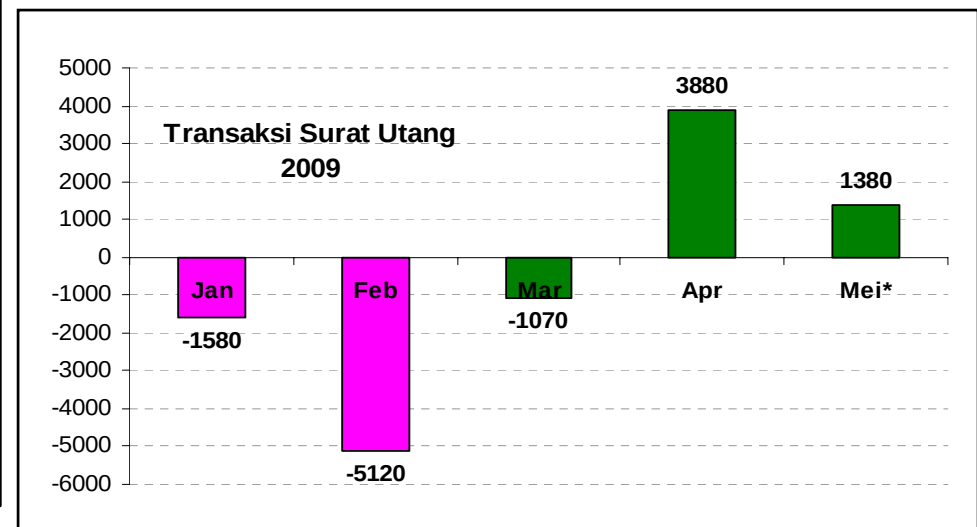
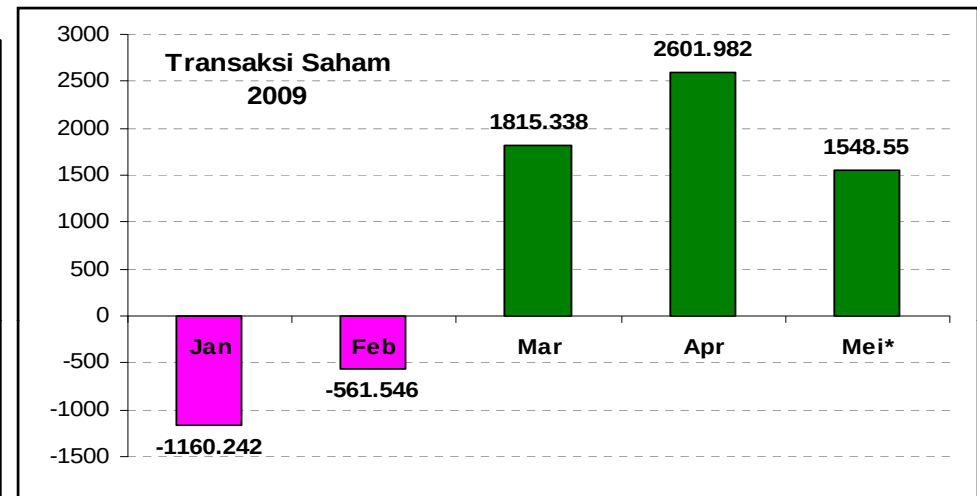
Kepercayaan Investor Mulai Pulih, IHSG 2nd Best Performance Setelah China....

Rupiah telah Menguat 6,52% dan IHSG menguat 33.36% sejak awal 2009 .



Sumber: Bloomberg

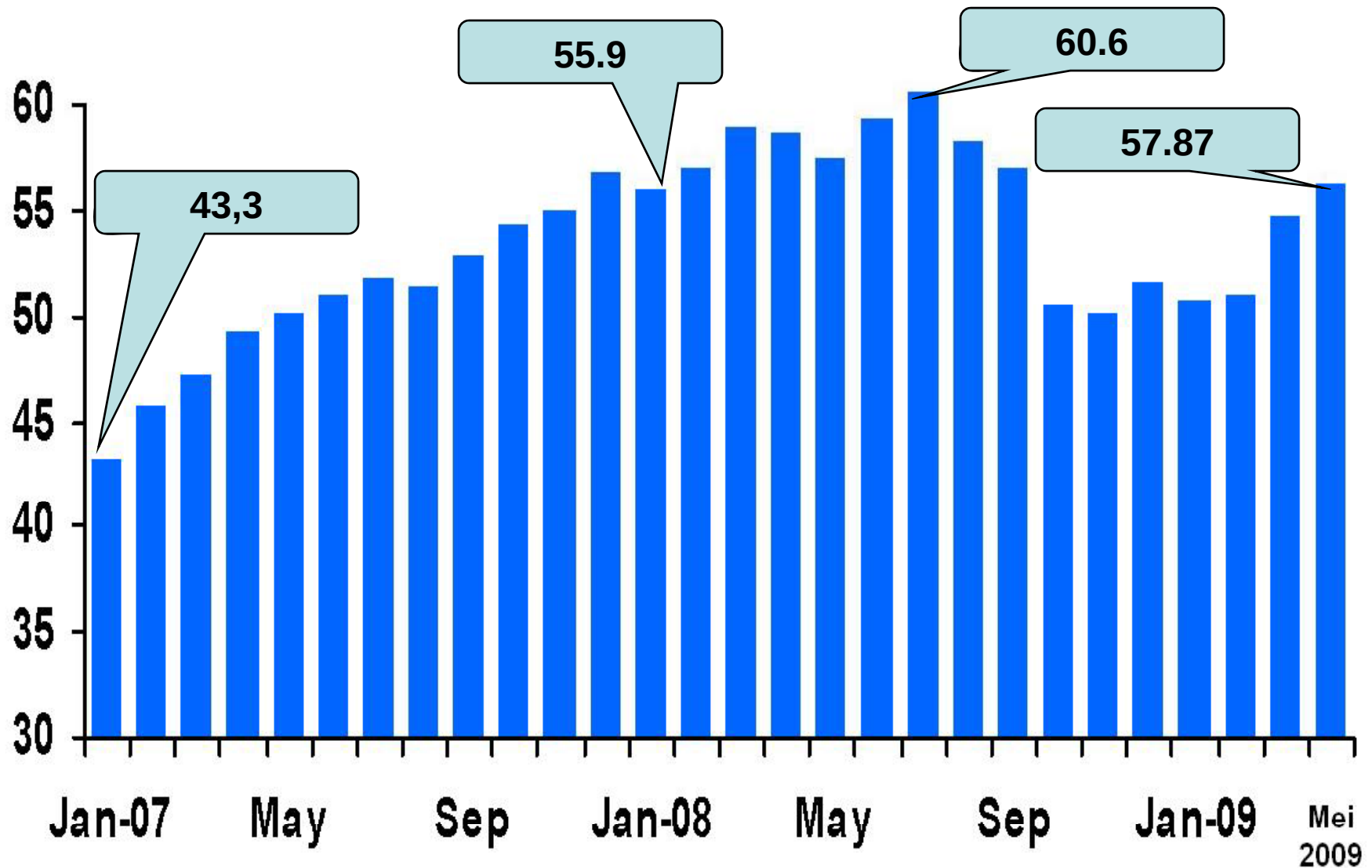
Arus Modal Masuk mulai terjadi kembali



Sumber: Bloomberg



Posisi cadangan devisa telah meningkat kembali,
per Akhir Mei 2009 = **USD 57.87 Milyar**





Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Q1 – 2009 mencapai 4,37% di dukung oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

	2008				2009
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Konsumsi Rumah Tangga	5.67	5.52	5.33	4.84	5.84
Konsumsi Pemerintah	3.62	5.26	14.06	16.35	19.35
Investasi	13.73	12.01	12.15	9.14	3.51
Ekspor	13.64	12.36	10.63	1.82	-19.1
Import	17.99	16.11	10.97	-3.53	-24.1
Pertumbuhan Ekonomi	6.25	6.42	6.4	5.18	4.37

Sumber : BPS



Sektor Pertanian masih kuat, namun untuk Sektor Pengolahan dan Perdagangan terimbas krisis global. Sektor Transportasi-Komunikasi serta sektor Listrik, Air, dan Gas masih mencatat pertumbuhan tertinggi.

Sektor	2007**				2008**				2009***
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Pertanian (+)	-2.10	5.59	7.75	2.00	6.32	4.80	3.43	4.74	4.79
Pertambangan (+)	6.17	3.25	0.99	-2.03	-1.65	-0.45	2.11	2.07	2.16
Pengolahan (-)	5.22	5.13	4.55	3.82	4.28	4.23	4.31	1.85	1.62
Listrik, Air dan Gas (+)	8.16	10.20	11.29	11.55	12.35	11.77	10.41	9.34	11.42
Konstruksi (+)	8.43	7.70	8.32	9.94	8.01	8.12	7.57	5.67	6.33
Perdagangan (-)	9.26	7.82	7.97	8.64	6.87	8.11	8.42	5.55	0.57
Transportasi & Komunikasi (+)	12.96	13.73	14.79	14.52	18.33	17.32	15.53	15.82	16.68
Keuangan (-)	8.13	7.58	7.58	8.65	8.34	8.66	8.60	7.42	6.27
Jasa dan Lainnya (+)	7.02	7.04	5.20	7.17	5.85	6.74	7.19	6.01	6.81
Pertumbuhan Ekonomi	6.03	6.64	6.58	5.85	6.25	6.42	6.40	5.18	4.37



Kerangka Ekonomi Makro 2010

Tema RKP 2010:

Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Program Pembangunan Nasional

1. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial,
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia,
3. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional,
4. Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi, serta
5. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Sasaran Ekonomi Makro



Sasaran Ekonomi Makro

	2009 (Perkiraan)	2010
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4 - 4.5	5.0 - 6.0
Inflasi (%) y-o-y	5.0 - 5.5	4.5 - 5.5
Tingkat Bunga SBI 3 Bulan (%)	7.0 - 7.5	6.0 - 7.0
Nilai Tukar (Rp/US\$ 1)	10.000 – 10.500	9.500 - 10.500
Harga Minyak (US\$/barel)	50-60	45 - 60
Lifting (MBCD)	0.96	0.950 - 0.970
Gas Bumi (BBTUD)	7526,3	8201
Batu Bara (MTPA)	250	250

Ket :

MBCD: Million Barrel Crude per Day

BBTUD : Billion British Thermal Unit per Day

MTPA : Million ton per Annum



Pertumbuhan Ekonomi 2009 -2010

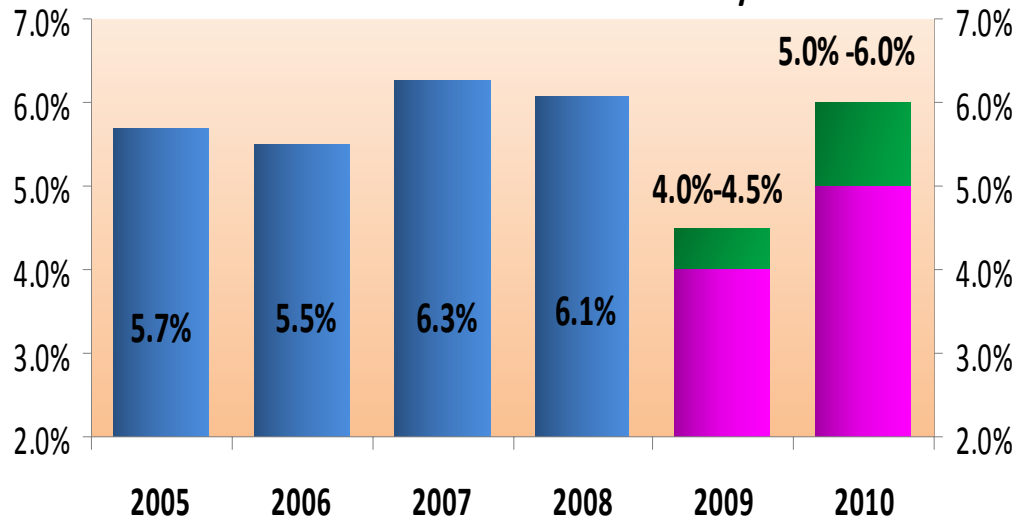
	2009	2010
PDB	4.00-4.50	5.0 - 6.0
Konsumsi RT	3.5-4.0	4.2-4.8
Konsumsi Pemt	7.7-8.6	6.0-6.7
PMTB	4.1-5.5	7.1-7.6
Ekspor	(7.00)-(5.00)	5.0-7.0
Impor	(9.6)-(7.00)	6.1-6.8

- Pertumbuhan ekonomi Q1 2009 mencapai 4,37 dengan didukung oleh Konsumsi RT & Pemerintah, serta Investasi.
- Pertumbuhan 2010 dapat berlanjut didukung oleh Konsumsi & Investasi
- Untuk Mencapai Target 2010 :
 - Kemiskinan : 12% – 13.5% (2009 = 12% -14%)
 - Pengangguran : 8% (2009 = 8.3% - 8.6%)



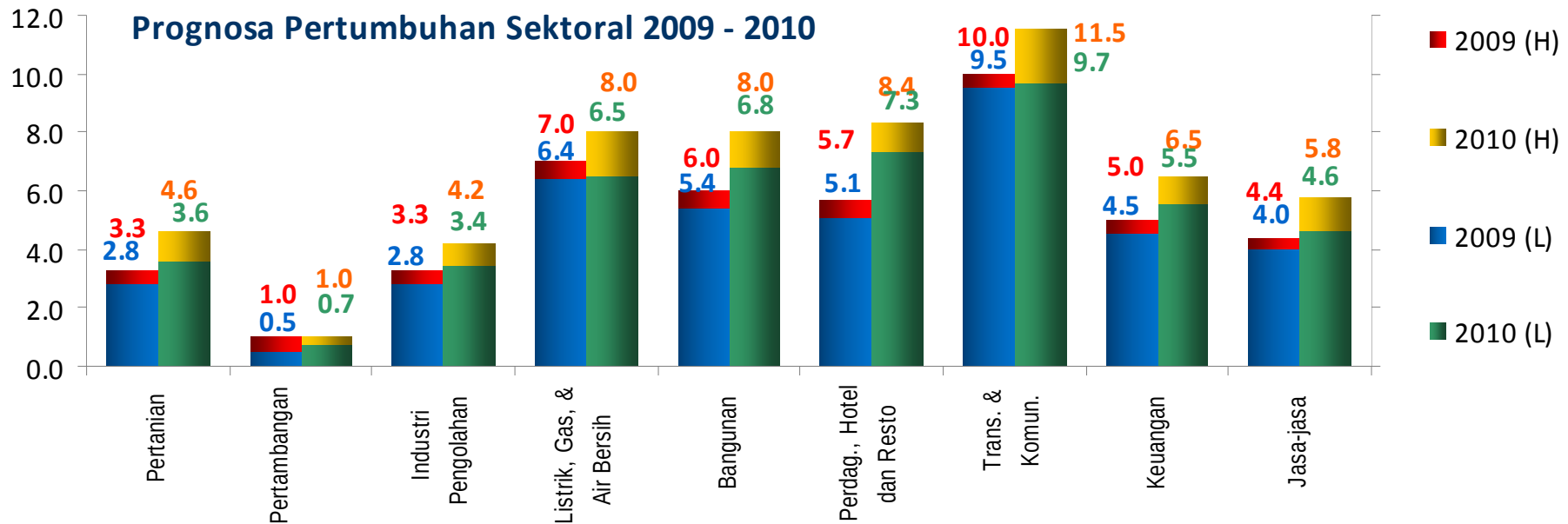
Pertumbuhan Ekonomi 2009 -2010

Pertumbuhan PDB : Realisasi dan Proyeksi



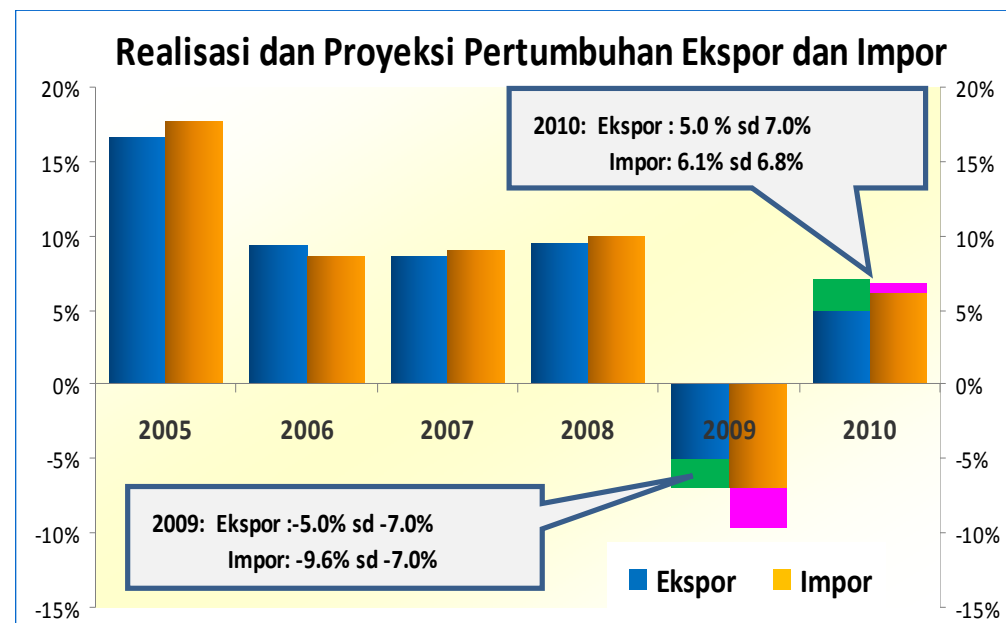
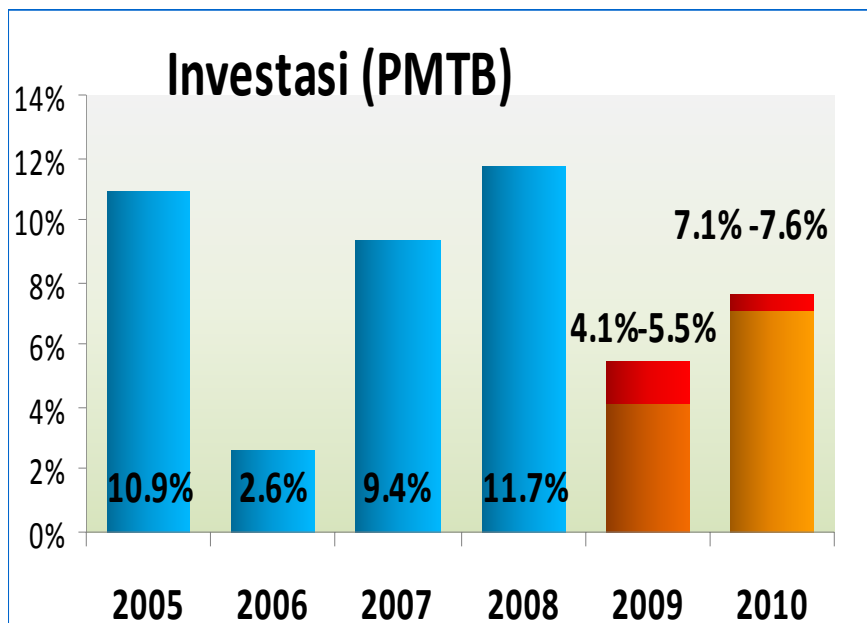
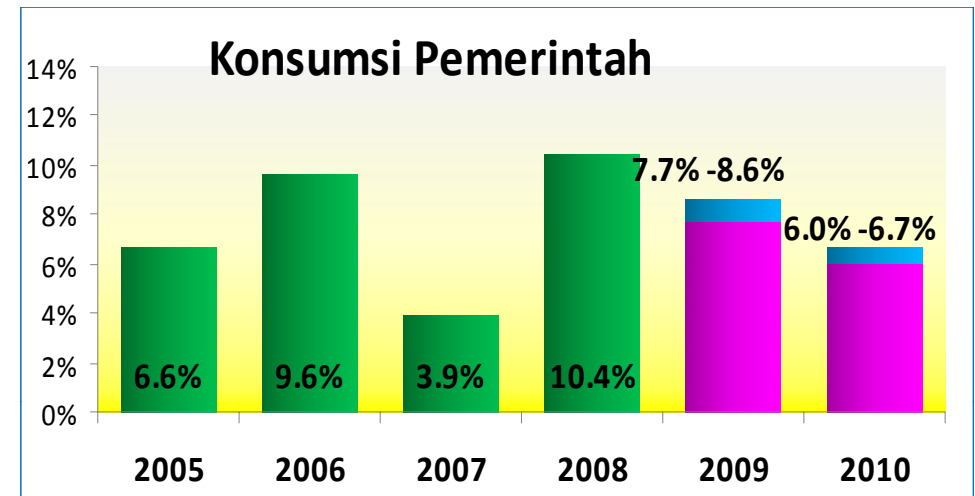
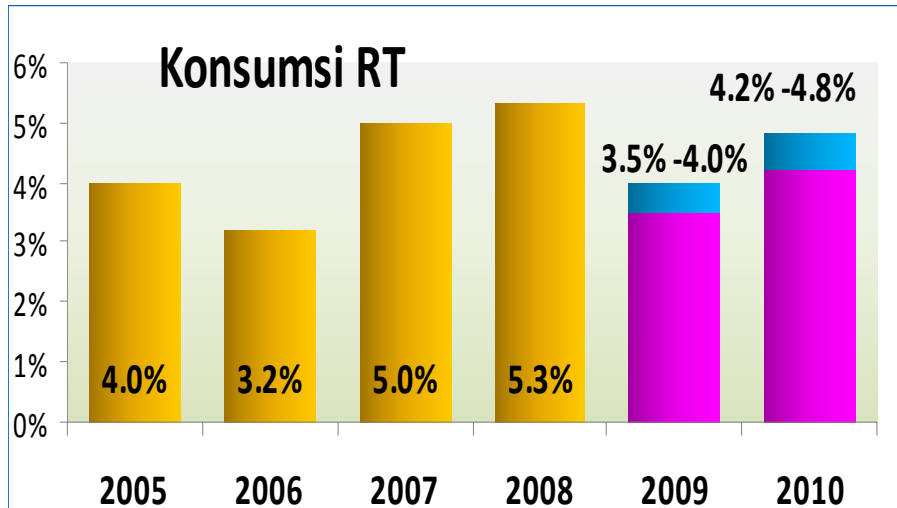
	2009	2010
PDB	4.00-4.50	5.0 - 6.0
Konsumsi RT	3.5-4.0	4.2-4.8
Konsumsi Pemt	7.7-8.6	6.0-6.7
PMTB	4.1-5.5	7.1-7.6
Ekspor	(7.00)-(5.00)	5.0-7.0
Impor	(9.6)-(7.00)	6.1-6.8

Prognosa Pertumbuhan Sektoral 2009 - 2010





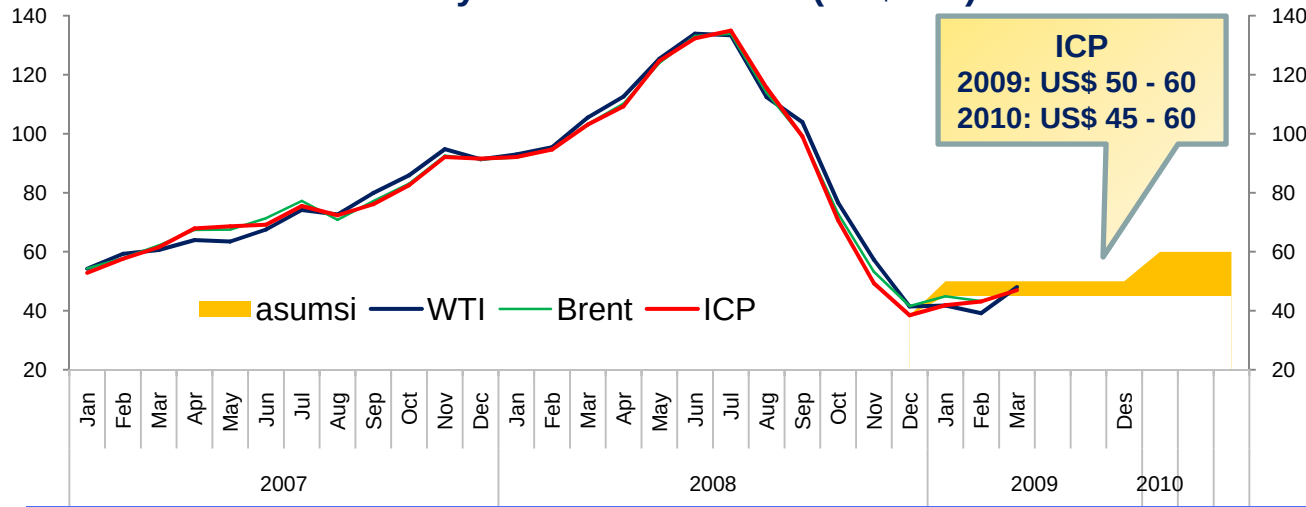
Komponen PDB Pengeluaran : 2009 - 2010





Harga Minyak dan Lifting Minyak ICP

Perkembangan dan Proyeksi Harga Minyak Dunia dan ICP (US\$/brl)

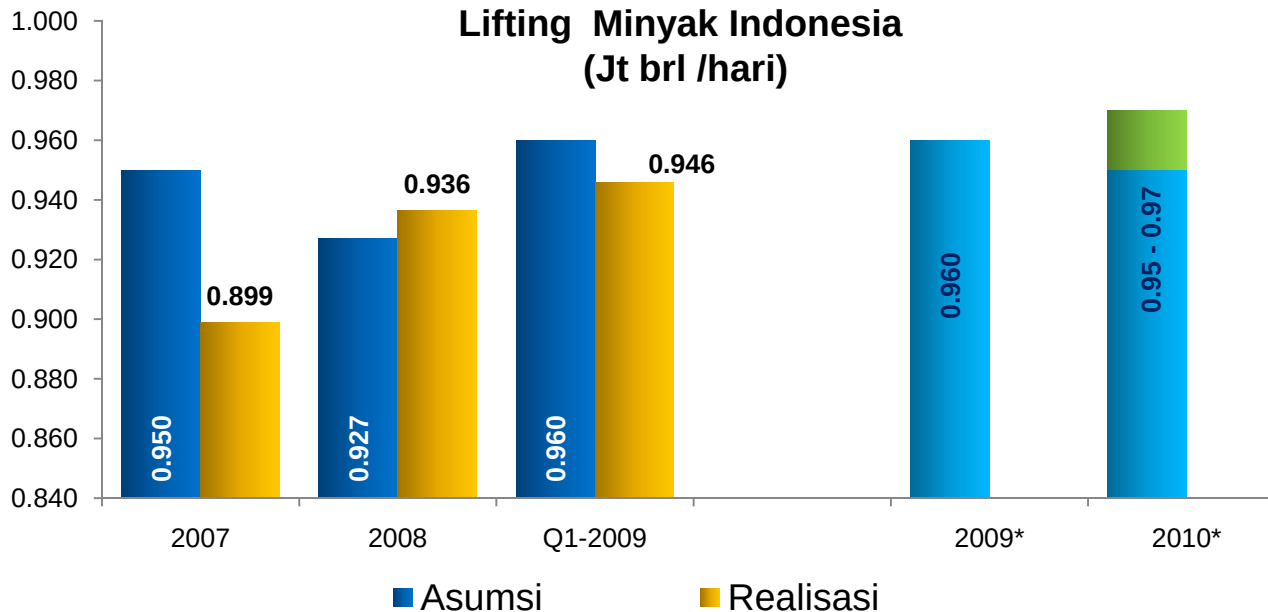


ICP

2009 = US\$50 - 60 /brl

2010 = US\$45 - 60 /brl

Lifting Minyak Indonesia (Jt brl /hari)



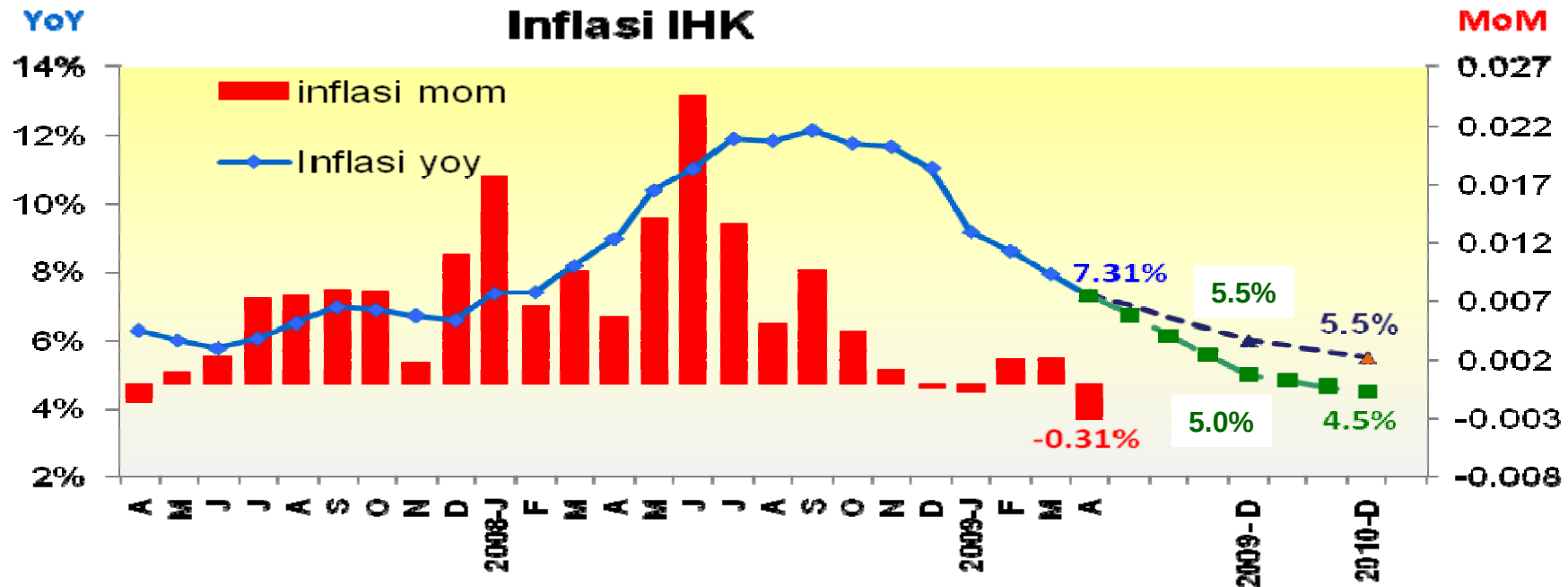
Lifting Minyak Indonesia

2009 = 0.96 jt brl/hr

2010 = 0.95 - 0.97 jt brl/hr



Target Sasaran Inflasi dalam kecenderungan menurun



Inflasi : 2009 = 5.0% - 5.5% dan 2010 = 4.5% - 5.5%

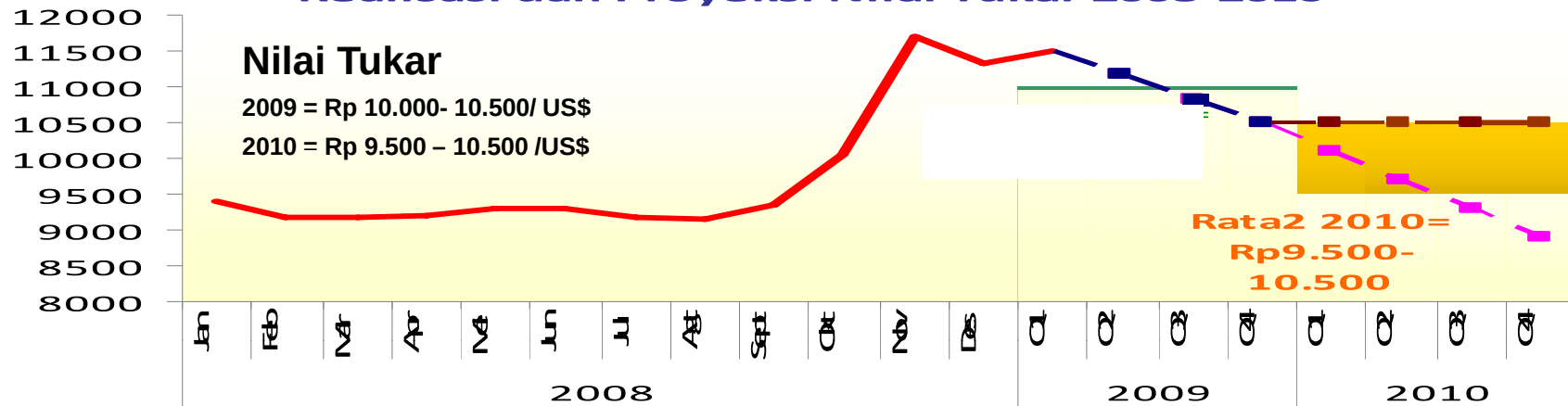
Dikarenakan :

- Rendahnya volatilitas Nilai Tukar, karena arus modal masuk
- Terjaganya pasokan dan arus distribusi barang



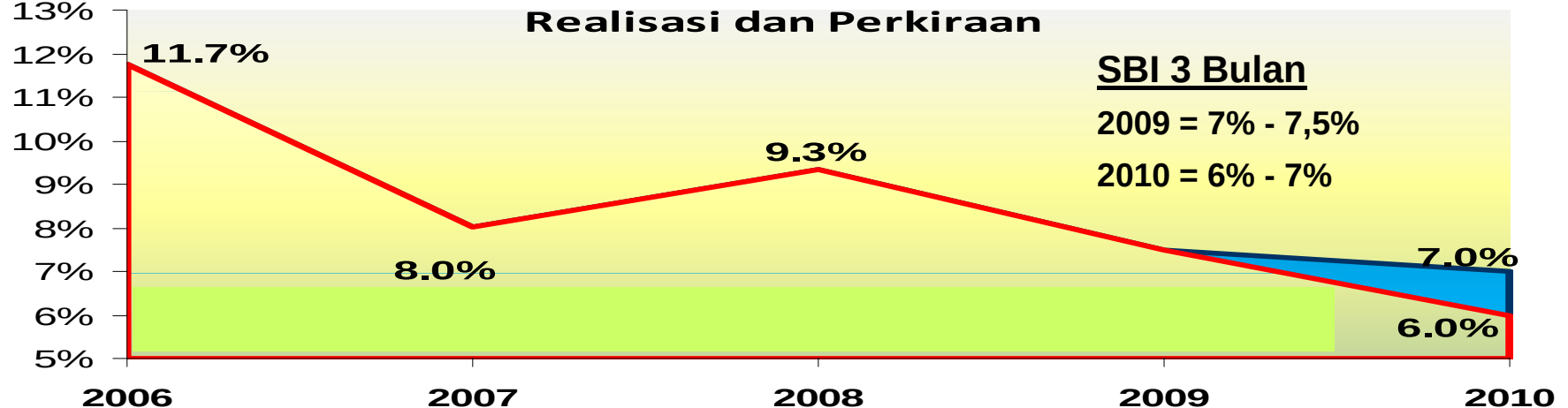
Nilai tukar yang stabil dan Menguat serta suku Bunga Bank Indonesia dijaga pada tingkat yang aman dengan kecenderungan menurun sesuai dengan target inflasi.

Realisasi dan Proyeksi Nilai Tukar 2008-2010



- Capital inflow yang lebih baik
- Kinerja Ekspor kembali meningkat seiring membaiknya global demand

Perkembangan Suku Bunga SBI 3 bulan 2006-2010 :

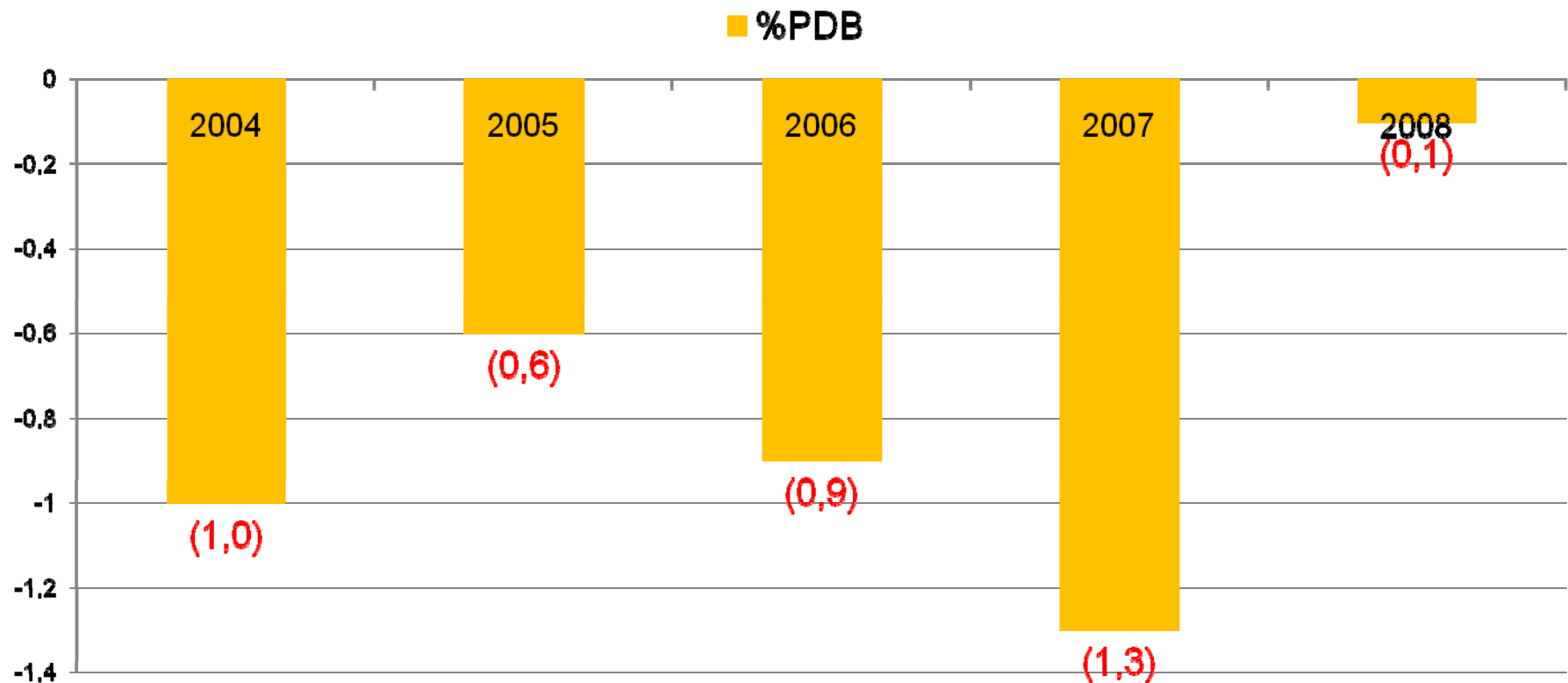




Kebijakan Fiskal 2004-2008



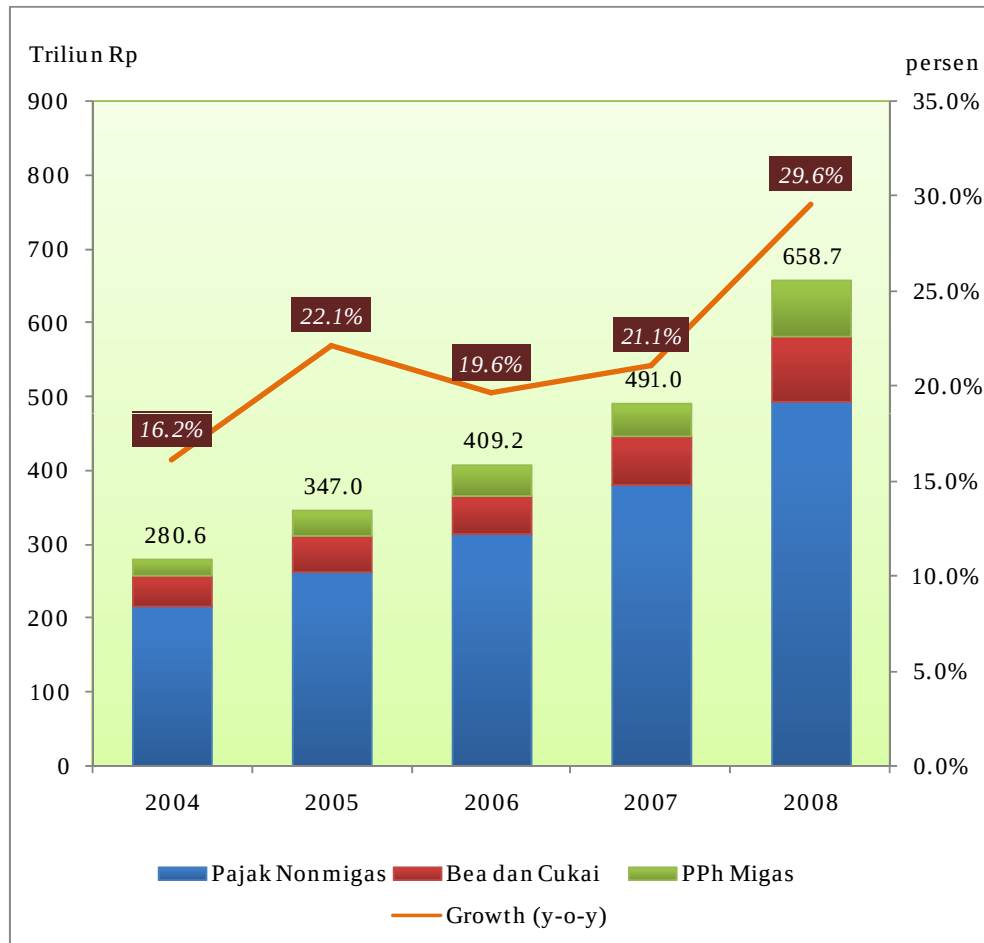
Realisasi Defisit APBN 2004-2008



- Realisasi Defisit APBN sangat dipengaruhi oleh perkembangan penerimaan negara (Pajak & PNBP) serta realisasi belanja negara
- Realisasi Defisit APBN 2008 turun tajam karena tingginya pencapaian pendapatan negara dari yang direncanakan di APBN-P



Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Bea Cukai 2004-2008 diatas pertumbuhan perekonomian nasional



Penerimaan perpajakan 2004-2008 tumbuh rata-rata 23,8%

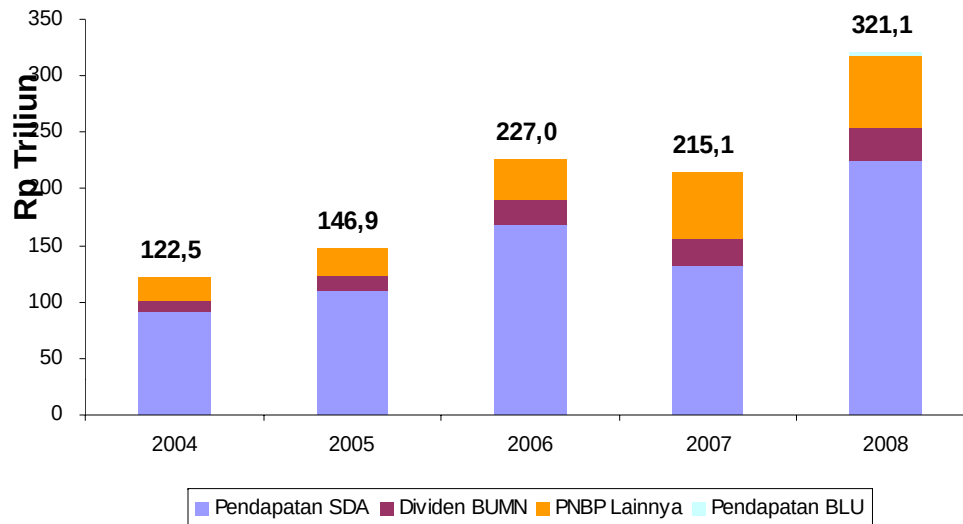
- Pajak nonmigas tumbuh rata-rata 23,0%, didukung oleh penggalan potensi dan reformasi birokrasi DJP
- Penerimaan bea dan cukai tumbuh rata-rata 20,2% karena reformasi birokrasi di DJBC
- PPh migas tumbuh rata-rata 35,4%, akibat tingginya harga minyak dunia
- *Tax Ratio* 2008 mencapai 13,3%
- Peningkatan Perpajakan didukung oleh kebijakan : Reformasi Perpajakan dan kepastian, Amandemen UU Perpajakan dan kepastian

	2004	2005	2006	2007	2008
Pajak Nonmigas	215.7	263.4	315.0	381.4	494.1
Bea dan Cukai	41.9	48.5	51.0	65.6	87.6
PPh Migas	22.9	35.1	43.2	44.0	77.0
Total	280.6	347.0	409.2	491.0	658.7



Realisasi PNBP 2004-2008

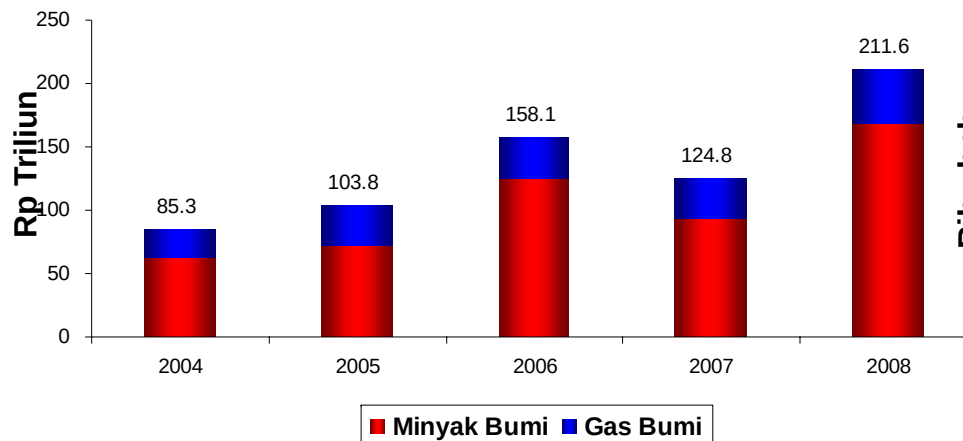
Perkembangan PNBP



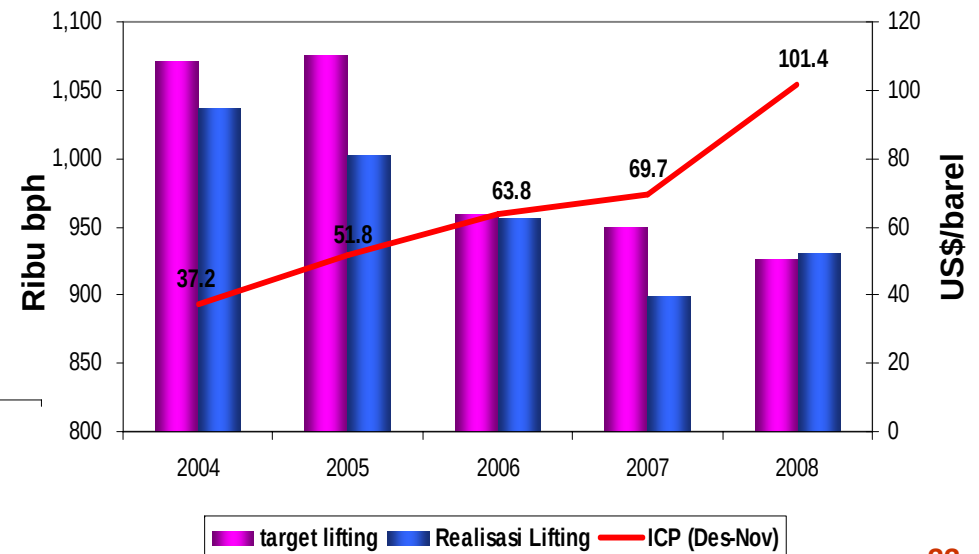
PNBP 2004-2008 PNBP tumbuh rata-rata : 27,2%

- Didorong oleh kenaikan harga minyak
- Perbaikan administrasi dan pelayanan PNBP K/L
- Peningkatan kinerja BUMN

Perkembangan SDA Migas

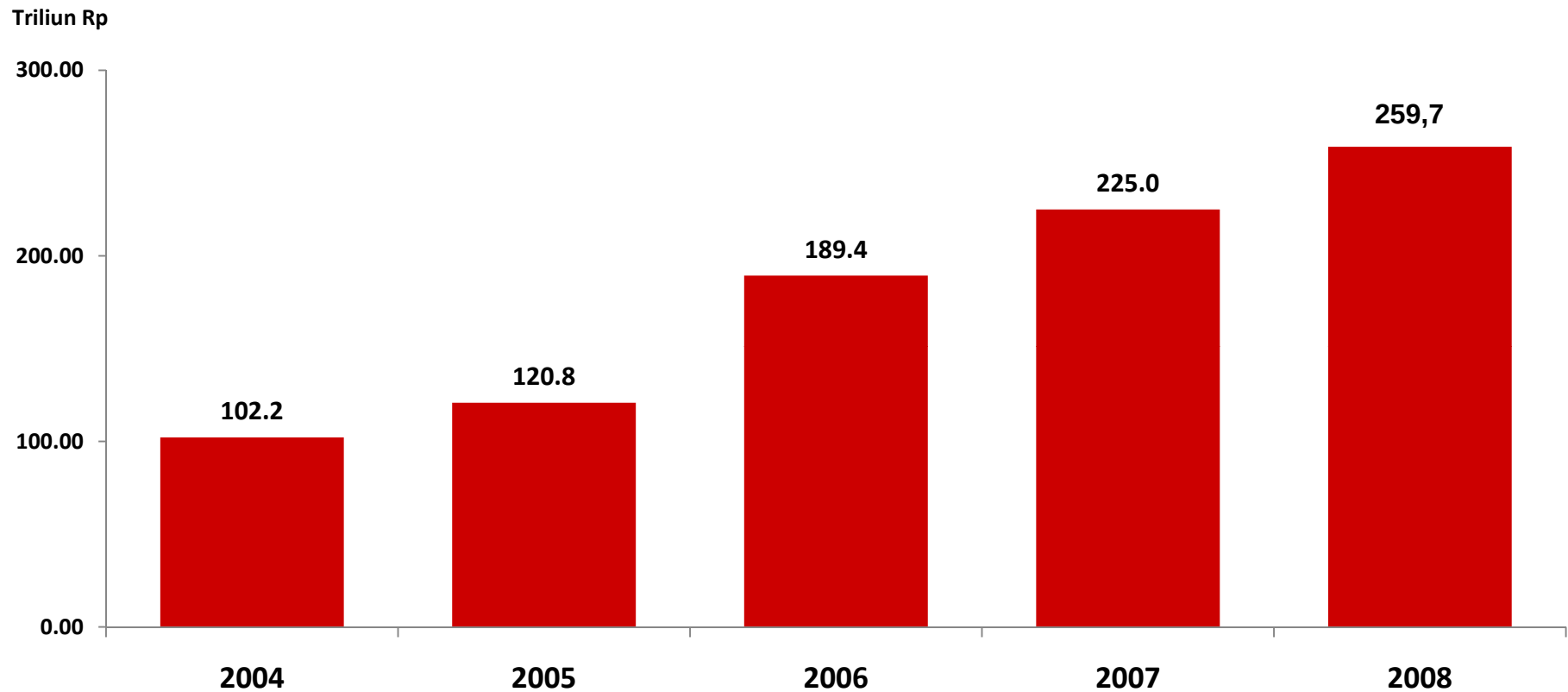


Perkembangan ICP dan Lifting





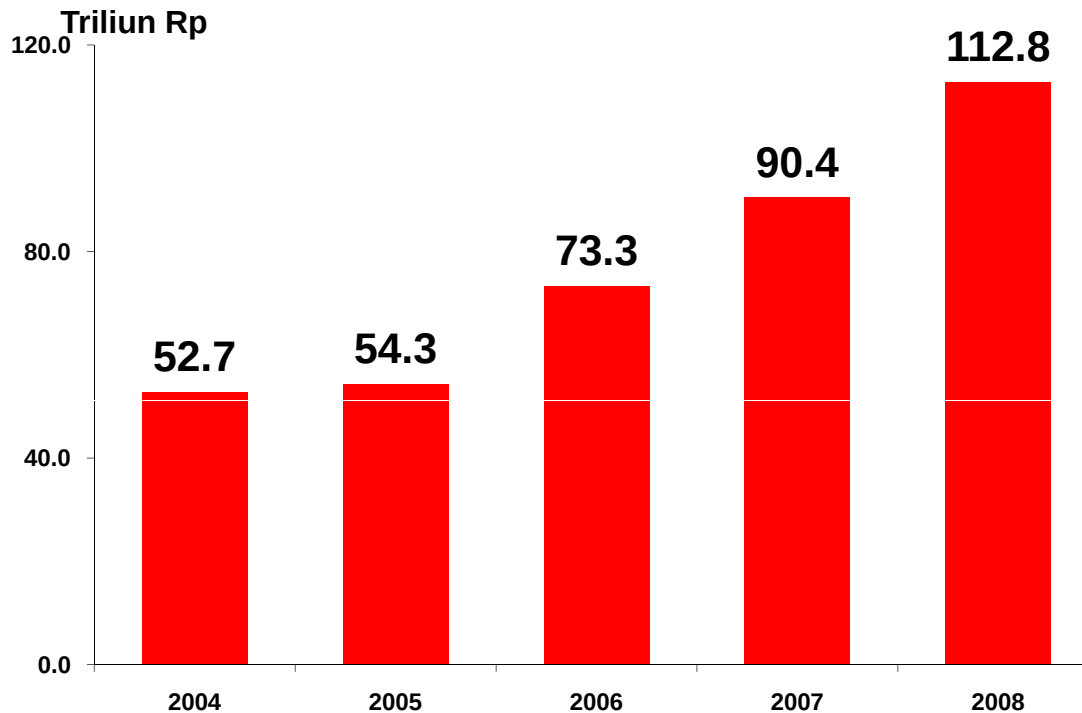
Belanja K/L 2004-2008 meningkat untuk mendukung program-program pembangunan nasional



Belanja K/L secara nominal meningkat rata-rata 26,3 % per tahun



Realisasi Belanja Pegawai tahun 2004-2008 juga meningkat



Kebijakan Belanja pegawai diarahkan pada:

- Peningkatan Gaji Pokok & Pensiun Pokok aparatur negara
- Pemberian Gaji ke 13.
- Kenaikan Tunjangan Lauk Pauk anggota TNI & Polri
- Pemberian uang makan bagi PNS
- Perbaikan sharing pembayaran pensiun yang menjadi kewajiban APBN menuju ke 100%

Take Home Pay PNS

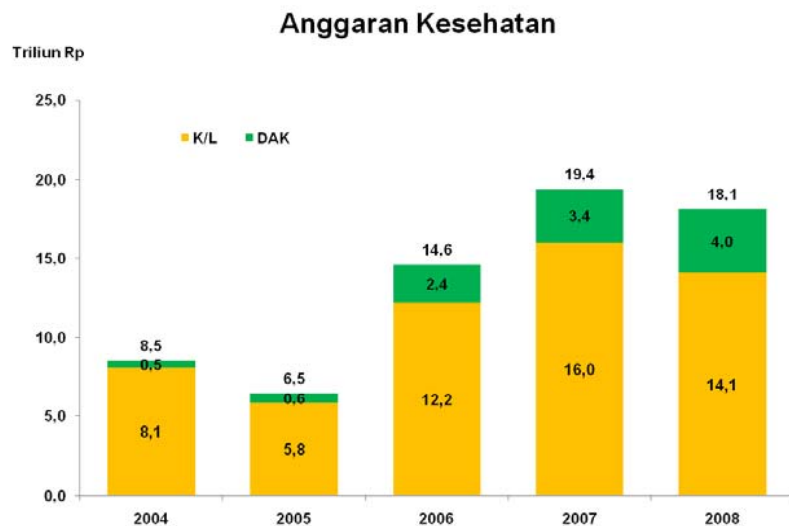
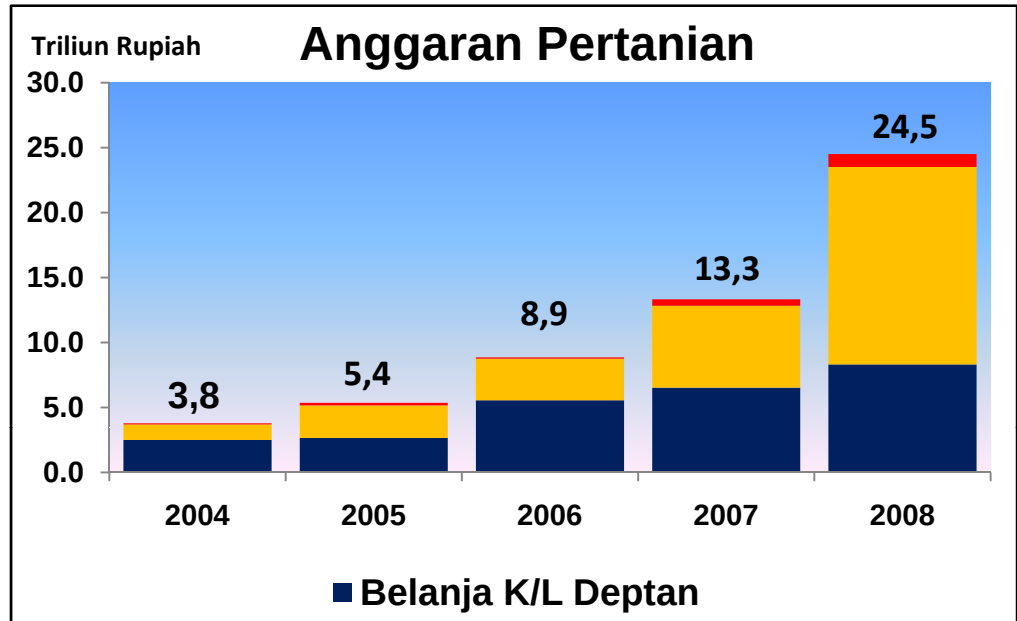
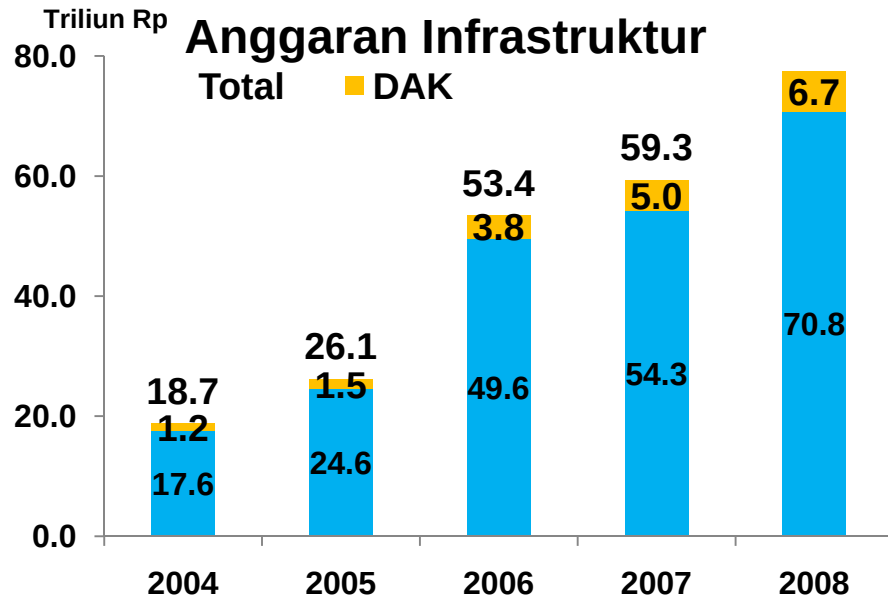
Golongan	2004	2005	2006	2007	2008
Gol I	674,050	674,050	1,000,000	1,285,400	1,569,300
Gol IV	1,831,450	1,831,450	2,291,450	2,853,900	3,472,300

Take Home Pay TNI/POLRI

	2004	2005	2006	2007	2008
Gol IA - 0 thn	1,271,600	1,271,600	1,584,300	1,843,400	2,158,800
Gol IVA - 0 thn	1,923,600	1,923,600	2,161,300	2,518,200	2,983,600



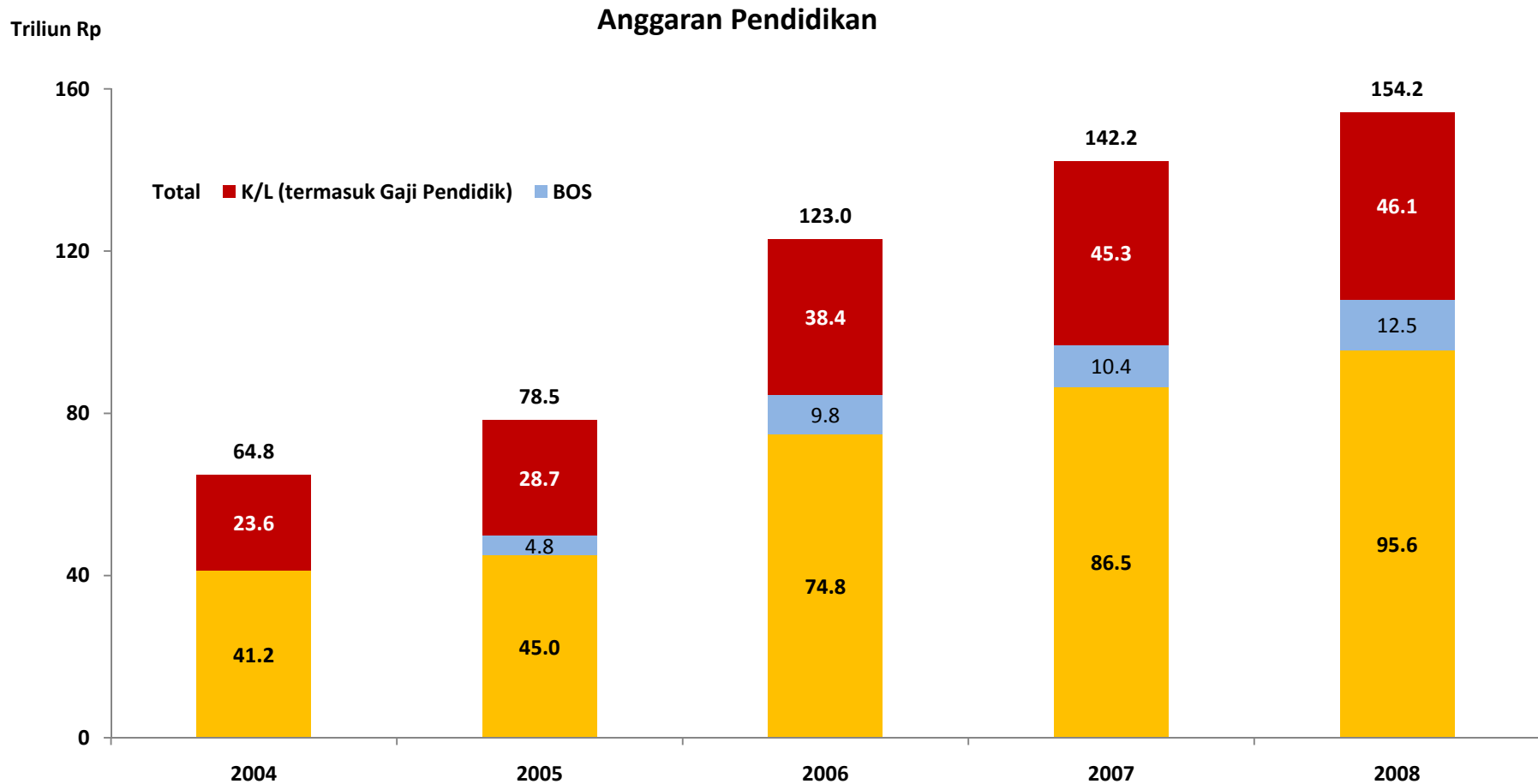
Peningkatan Realisasi Anggaran Belanja Infrastruktur, Kesehatan, dan Pertanian 2004-2008



- Anggaran Infrastruktur diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja
- Anggaran pertanian (K/L & Subsidi) meningkat untuk mendukung revitalisasi pertanian dan kesejahteraan petani
- Trend peningkatan anggaran Kesehatan untuk mendukung program Askeskin/ Jamkesmas



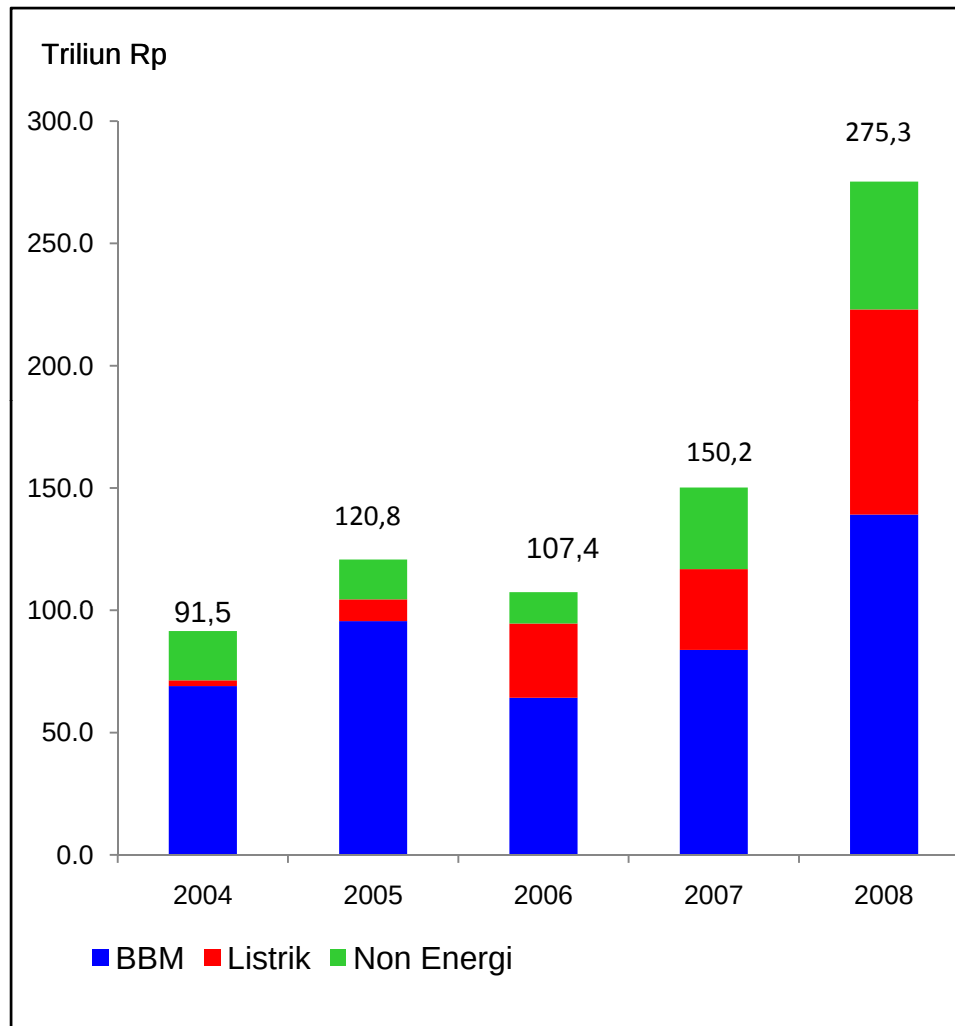
Peningkatan Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan 2004-2008



Anggaran pendidikan diupayakan terus meningkat untuk mencapai pemenuhan 20% dari APBN sesuai dengan amanat UUD 1945



Realisasi Anggaran Subsidi, 2004-2008

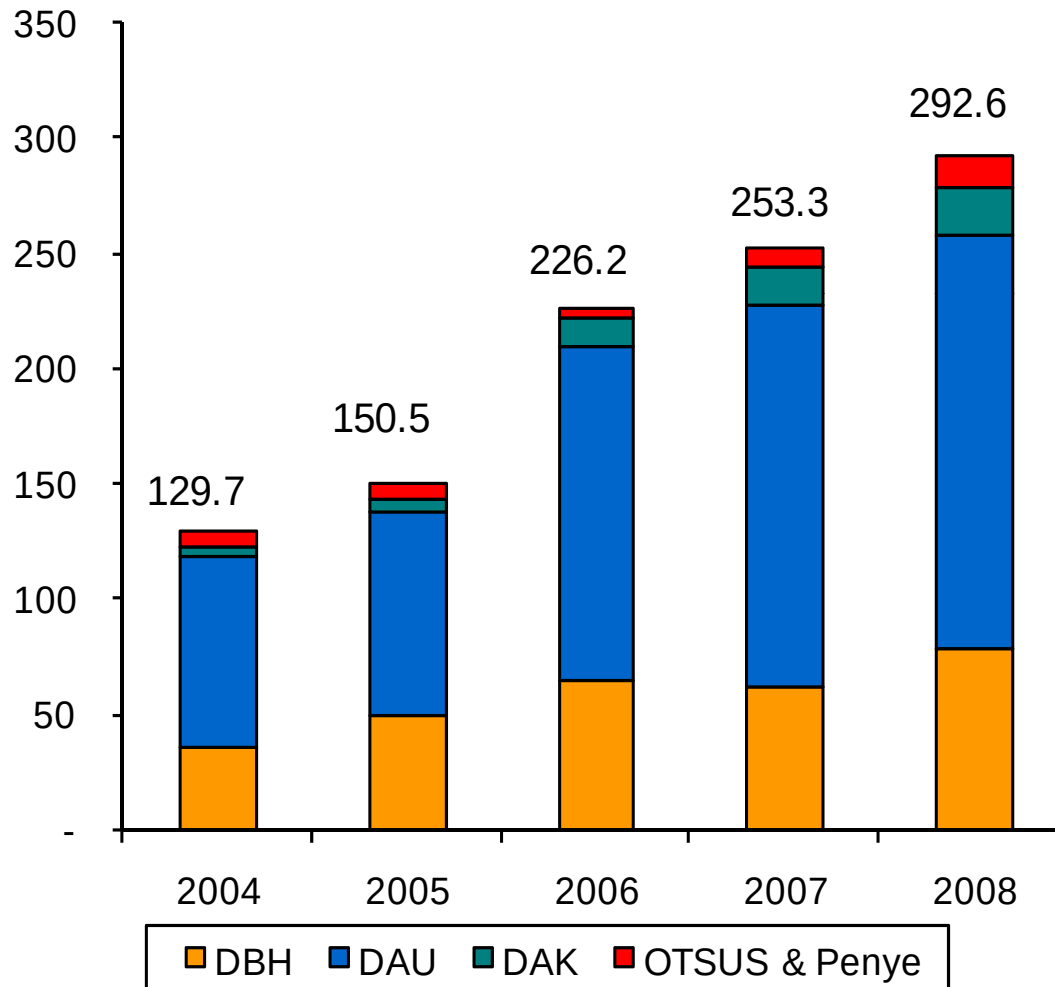


Kebijakan Subsidi :

- Subsidi (BBM dan Listrik) sangat tergantung pada perubahan harga minyak dunia
- Peningkatan subsidi Pupuk dan Benih untuk memperbaiki produktivitas dan revitalisasi hasil Pertanian
- Memperluas rumah tangga sasaran & volume subsidi Pangan
- Penghematan subsidi BBM melalui program konversi Mitan ke LPG serta pengembangan bahan bakar nabati



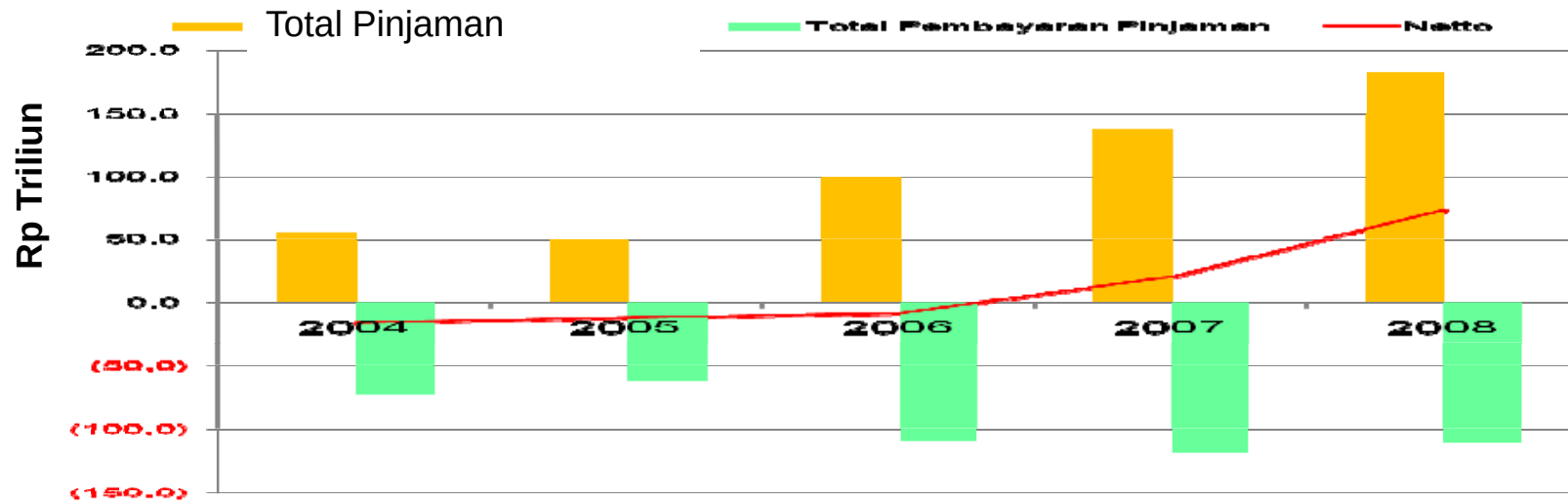
Peningkatan Realisasi Transfer ke Daerah 2004-2008 untuk mendukung kebijakan Desentralisasi Fiskal



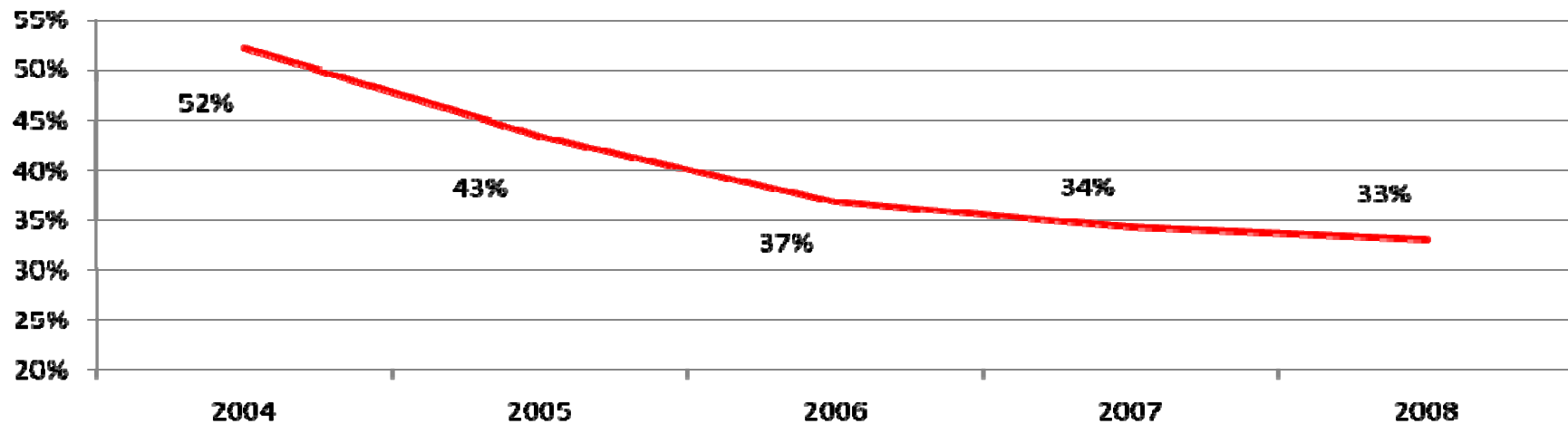
- Alokasi transfer ke daerah meningkat rata-rata 22,6% dari tahun 2004-2008.
- Alokasi DAU meningkat rata-rata 21,6% untuk mengurangi kesenjangan antar-Daerah.
- Alokasi DBH meningkat rata-rata 21,0 % untuk mengurangi kesenjangan antara Pusat & Daerah.
- Alokasi DAK meningkat rata-rata 50,7% mendukung program prioritas pembangunan nasional.
- Alokasi Dana Otsus Papua & NAD dan Dana Penyesuaian meningkat rata-rata 18,9% sesuai dengan amanat UU



Realisasi Pinjaman dalam 2004-2008 lebih tinggi dari pembayaran kewajiban, namun rasio utang semakin turun



Rasio Stok Utang Pemerintah semakin menurun (% PDB)





Kebijakan Fiskal 2009



Antisipasi APBN 2009 menghadapi krisis Global melalui Program Stimulus Fiskal

1. Perubahan defisit APBN 2009 dari 1% PDB menjadi 2,5% PDB karena perubahan asumsi makro dan Program stimulus Fiskal
2. Kenaikan Defisit APBN 2009 dibiayai dari:
 - a. SILPA 2008 sebesar Rp51,3 T
 - b. Pembiayaan utang dengan dukungan pinjaman siaga
3. Besaran stimulus Rp73,3 T (1,4% PDB), terdiri dari stimulus perpajakan, energi dan kepabeanaan, serta stimulus belanja negara.



Total Stimulus Fiskal 2009 mencapai Rp 73,3 T (1,4% PDB)

Uraian	Nilai (Rp Triliun)
A. Penghematan Pembayaran Pajak	43.0
1. Penurunan tarif PPh OP (35% --> 30%) dan perluasan	13.5
2. Peningkatan PTKP menjadi Rp15,8 juta	11.0
3. Penurunan tarif PPh Badan (30% -> 28%) dan Perusahaan masuk bursa --> tarif 5% lebih rendah	18.5
B. Subsidi Pajak-BM/DTP kepada Dunia Usaha/RTS	13.3
1. PPN Minyak Goreng	0.8
2. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	0.2
3. Bea Masuk Bahan Baku dan Barang Modal	2.5
4. PPN Eksplorasi Migas	2.5
5. PPh Panas Bumi	0.8
6. PPh Pasal 21	6.5
C Subsidi Non Pajak pada Dunia Usaha/Lapangan Kerja	17.0
1. Penurunan Harga Solar Rp300/liter	2.8
2. Diskon Tarif Listrik untuk Industri	1.4
3. Perluasan PNPM	0.6
4. Tambahan Stimulus Belanja	12.2
Jumlah Stimulus	73.3



Pelaksanaan Stimulus Fiskal bidang Perpajakan dan Kepabeanan sudah berjalan efektif

Uraian	Alokasi (Rp Triliun)	Keterangan
A. Penghematan Pembayaran Perpajakan	43.0	
1. Penurunan tarif PPh OP (35% --> 30%) dan perluasan lapisan tarif	13.5	Efektif 1 Jan 2009
2. Peningkatan PTKP menjadi Rp15,8 juta	11.0	Efektif 1 Jan 2009
3. Penurunan tarif PPh Badan (30% --> 28%) dan Perusahaan masuk bursa --> tarif 5% lebih rendah	18.5	Efektif 1 Jan 2009
B. Subsidi Pajak/BM (DTP) kepada Dunia Usaha/RTS	13.3	
1. PPh Panas Bumi	0.8	Efektif 1 Jan 2009
2. PPh Pasal 21	6.5	Efektif 18 Mar 2009
3. PPN Minyak Goreng	0.8	Efektif 23 Des 2008
4. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	0.2	-
5. PPN Eksplorasi Migas	2.5	Efektif 1 Jan 2009
6. Bea Masuk Industri	2.5	Efektif 26 Feb 2009
Jumlah Stimulus	56.3	



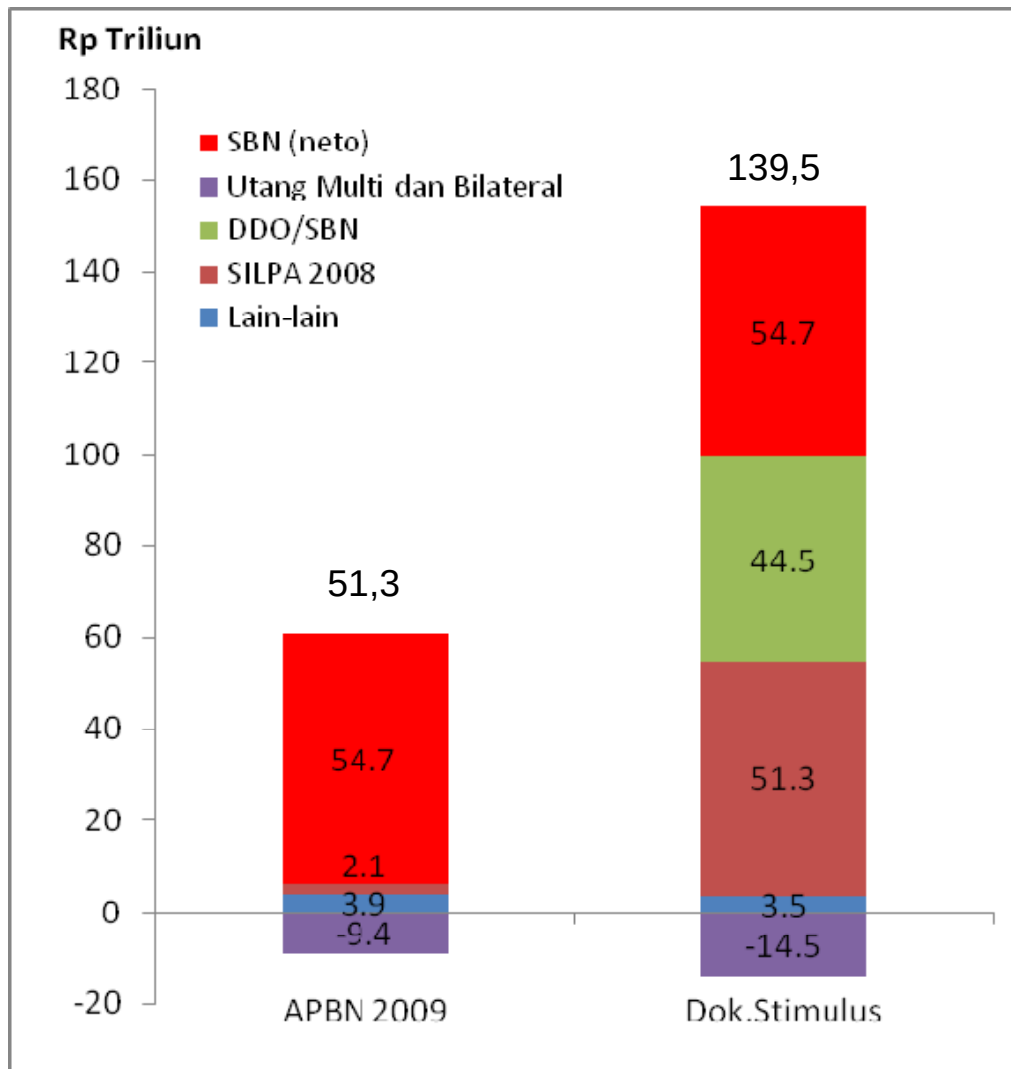
Pelaksanaan Stimulus Fiskal 2009 untuk belanja sebagian besar telah ditetapkan DPR

No	KEMENTERIAN /LEMBAGA	Dana Rp Miliar	KEGIATAN	KETERANGAN
1	DEPTAN	650.0	Jalan Sentra Produksi & Irigasi	Dalam Proses
2	DESDM	500.0	Transmisi, Jaringan, Gardu Induk, Desa Mandiri energi	DIPA SELESAI
3	DEPHUB	2,198,8	Infrastruktur KA, Bandara, Pelabuhan & Penyeberangan	DIPA dalam Proses
4	DEPKES	150.0	Pengembangan RSCM	DIPA SELESAI
5	MENAKERTRANS	300.0	Peningkatan fungsi BLK	DIPA SELESAI
6	DKP	100.0	Perumbahan Nelayan, daerah perbatasan	DIPA SELESAI
7	DEP. PU	6.601,2	Jalan, Jembatan, Pemukiman, Air minum, Irigasi	SA-PSK & DIPA dalam Proses
8	MENKOP. & UKM	100.0	Pembangunan pasar untuk usaha Mikro & kecil	DIPA SELESAI
9	DEPDAG	335.0	Pasar Tradisional dan rehabilitasi gudang	DIPA dalam proses
10	MENPERA	400.0	Rusunawa TNI/Polri, Pekerja, Mahasiswa	DIPA SELESAI
11	BUN	865.0	Subsidi Obat, bunga untuk Air bersih, PMN kepada Askrindo dan Jamkrindo	DIPA SELESAI
JUMLAH		12,200.0		



Kenaikan Defisit APBN 2009 dibiayai dengan dana SILPA 2008 dan tambahan utang yang didukung oleh pinjaman siaga

Pembiayaan APBN 2009



- Defisit APBN 2009 meningkat Rp88,2 T dampak perubahan asumsi dan program stimulus fiskal
- Kenaikan defisit APBN 2009 dibiayai melalui:
 - Penggunaan dana SILPA Rp51,3 T
 - Tambahan Utang (termasuk Pinjaman siaga) Rp44,5 T
- Diversifikasi penerbitan SBN
- Pengurangan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) dengan mengutamakan utang jangka panjang;



Kebijakan Fiskal 2010



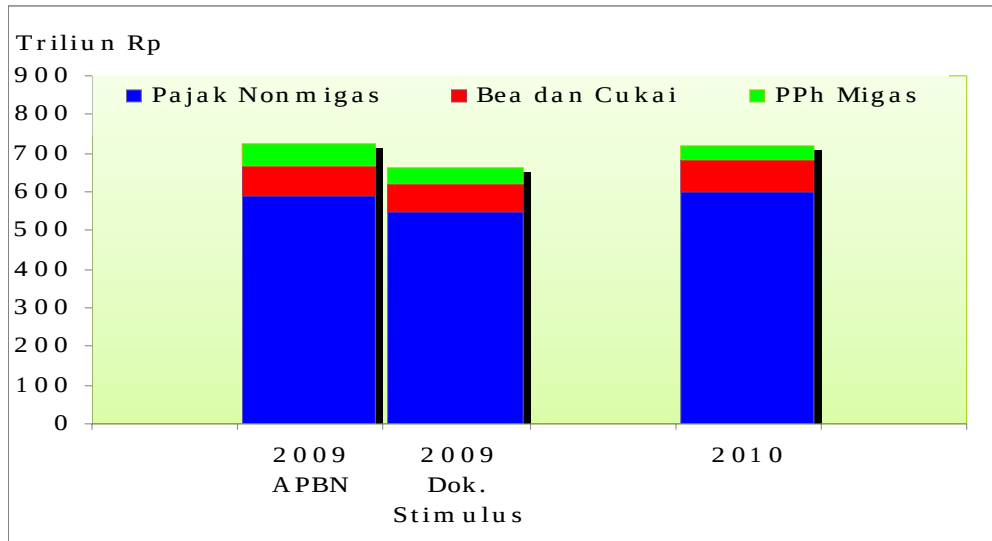
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Tahun 2010

- ❑ Meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan berbagai subsidi lainnya)
- ❑ Melanjutkan stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya
- ❑ Mendorong pemulihan dunia usaha termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk
- ❑ Meneruskan reformasi birokrasi
- ❑ Memperbaiki Alutsista
- ❑ Menjaga anggaran pendidikan 20%

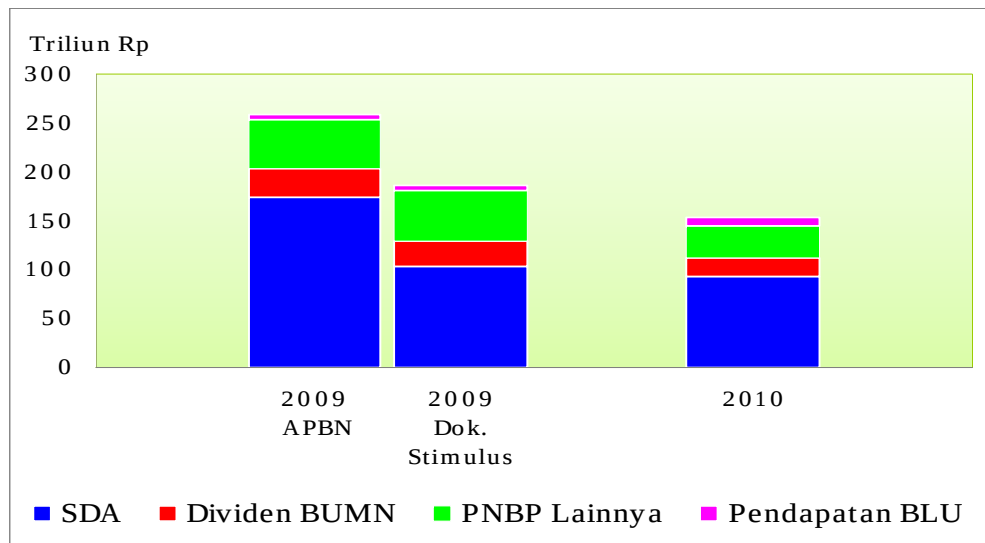


Kebijakan Pendapatan Negara, Tahun 2010

Penerimaan Perpajakan



PNBP



Pertumbuhan Pajak non-Migas naik sekitar 14% sebagai dampak perlambatan ekonomi 2009 dan pemulihan 2010

Kebijakan Perpajakan:

- Penurunan tarif PPh Badan 3% (28% → 25%) & Insentif PPN sejalan Amandemen UU PPh & UU PPN
- Subsidi Pajak PPN dan Bea Masuk sektor tertentu (stimulus pajak)
- Melanjutkan reformasi dan modernisasi di Perpajakan dan Kepabeanan

Kebijakan PNBP:

- Peningkatan produksi SDA (Migas dan non Migas)
- Peningkatan kinerja BUMN
- Perbaikan administrasi PNBP K/L

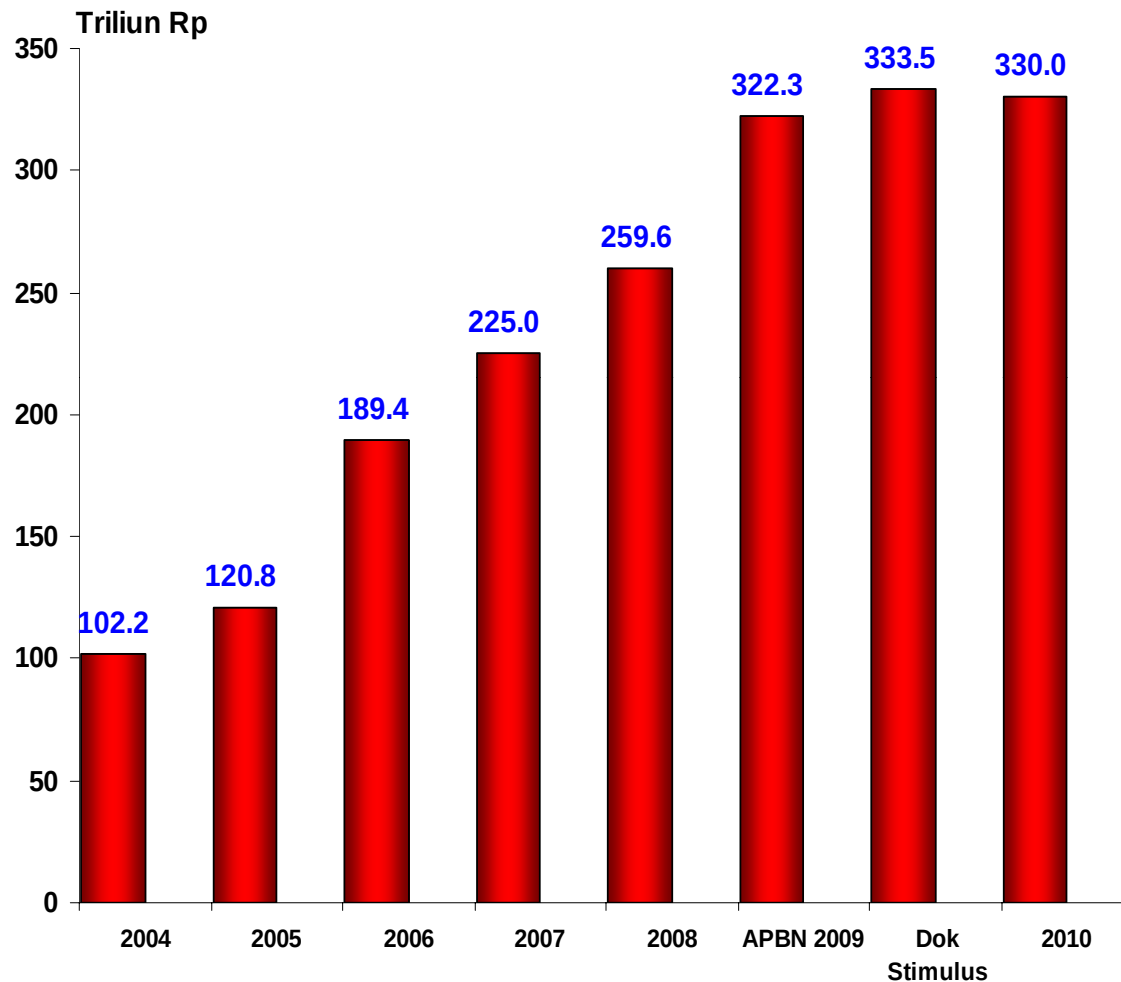


Dengan defisit sebesar 1,3% (Rp77,1 T), maka alokasi belanja K/L tahun 2010 sebesar Rp330 T (termasuk untuk stimulus belanja)

Uraian		Pagu Indikatif
I.	Pagu Indikatif K/L	330.0
1.	Mengikat	134.9
	- Belanja Pegawai	84.6
	- Belanja Barang	31.6
	- PNBP & BLU	18.7
2.	Tidak Mengikat	195.1
	- Belanja Barang	39.9
	- Belanja Modal	76.0
	- Bantuan Sosial	79.2
II.	Berdasarkan Sumber	330.0
1.	Rupiah Murni	285.7
2.	PNBP	11.7
3.	BLU	7.1
4.	Pinjaman DN	1.0
5.	Hibah Luar Negeri	1.4
6.	Pinjaman LN	23.1



Kebijakan Belanja K/L, Tahun 2010



- belanja K/L 2009 lebih tinggi dari 2010 karena adanya tambahan stimulus belanja
- Mempertahankan pendapatan riil aparatur negara
- Mempertahankan belanja Pendidikan, Infrastruktur Pertanian, dan Kemiskinan
- Menjaga kesinambungan program prioritas : BOS, PNPM, Jamkesmas, P KH
- Pengalokasian dana belanja untuk stimulus
- Melanjutkan Program reformasi birokrasi

*) Yang telah dialokasikan dalam SE Pagu Indikatif 2010 sebesar Rp323,9 T



Anggaran Pendidikan, Tahun 2010

	2009	2010 (Pagu Indikatif)
A. Anggaran Fungsi Pendidikan pada K/L (Rp Triliun)	89,55	83,00
B. Anggaran Fungsi Pendidikan pada Transfer ke Daerah (Rp Triliun)	117,86	113,53
Total Anggaran Pendidikan (Rp Triliun)	207,41	196,50
Rasio Anggaran Fungsi Pendidikan thd Belanja Negara (%)	20,0	20,6

Kebijakan Program Pendidikan tahun 2010 :

- Meningkatkan Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu dan merata;
- Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi
- Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
- Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik;



Prioritas Belanja infrastruktur RKP 2010 (1)

Pembangunan jalan:

- Peningkatan jalan nasional 1.571,6 km
- Pembangunan jalan di perbatasan 50,8 km
- Pembangunan jalan akses 45,3 km



- Peningkatan jembatan lintas 920,9 m
- Peningkatan jembatan non lintas 1.046,4 m
- Pembangunan jembatan di kawasan perbatasan.



Infrastruktur Pertanian:

- Pembangunan 6 waduk, 39 embung dan 11 situ
- Rehabilitasi 13 waduk, 17 embung dan 20 situ
- Pembangunan sarana & prasarana pengendali banjir sepanjang 190 km



- Pembangunan jalur ganda KA sepanjang 58,1 km di 8 lokasi
- Pembangunan MRT Jakarta
- Peningkatan jalan KA lintas Sumatera & Jawa sepanjang 357,5 km





Prioritas Belanja infrastruktur RKP 2010 (2)

Pelabuhan Udara:
Bandara Kualanamu, dan Bandara perbatasan, terpencil & rawan bencana



Pembangunan pembangkit 54 MW, gardu induk 150 kV dan transmisi 1358 kms



Peningkatan jangkauan, kapasitas & kualitas infrastruktur & layanan pos telematika



- Perpanjangan Dermaga Pelabuhan Belawan Medan 300 m
- Lanjutan pembangunan Tanjung Priuk
- Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran Ramsu 141 unit, Mensu 8 unit, Ramtun 9 unit.





Kebijakan Transfer ke Daerah, Tahun 2010

- Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar-daerah
- DAU tahun 2010 sebesar 26% dari PDN neto
- Mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah
- Mengalokasikan DBH Cukai Hasil Tembakau kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau dan daerah penghasil tembakau
- Prioritas DAK untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah
- Dana Penyesuaian diprioritaskan untuk gaji guru PNS Daerah



Postur Indikatif RAPBN 2010 dengan defisit 1,3% PDB

URAIAN	2009		2010
	APBN	Dok. Stimulus	Pagu Indikatif
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	985.7	848.6	871.9
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	984.8	847.6	870.5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	725.8	661.8	717.1
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	258.9	185.9	153.4
II. HIBAH	0.9	0.9	1.4
B. BELANJA NEGARA	1,037.1	988.1	949.1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	716.4	685.0	661.4
A. BELANJA K/L	322.3	333.5	330.0
B. BELANJA NON K/L	394.1	351.5	331.4
II. TRANSFER KE DAERAH	320.7	303.1	287.7
C. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(51.3)	(139.5)	(77.1)
<i>% defisit thd PDB</i>	<i>(1.0)</i>	<i>(2.5)</i>	<i>(1.3)</i>
D. PEMBIAYAAN (I + II)	51.3	139.5	77.1



Kebijakan Pembiayaan Defisit APBN 2010

- **Memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit Rp77,1 T (1,3% PDB).**
- **Sumber pembiayaan:**
 - ❑ Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)
 - Berbagai variasi tenor (jangka panjang dan jangka pendek)
 - Diversikasi instrumen (SUKUK, konvensional, GMTN, pembelian langsung, retail, “Samurai”, *non-tradable bonds*)
 - ❑ Pinjaman luar negeri
 - Pinjaman program (dari Bank Dunia, ADB, IDB, Jepang & Perancis)
 - Pinjaman Proyek, khususnya untuk kegiatan *multi-year*
 - ❑ Pemanfaatan pinjaman siaga (2009-2010)
 - Pinjaman siaga berasal dari Bank Dunia, ADB, dan bilateral



Risiko Fiskal Tahun 2010 ... (1)

A. Risiko Ekonomi Makro :

1. Pertumbuhan Ekonomi → apabila krisis global berkepanjangan

- Pemulihan sektor riil berlangsung lebih lama, sehingga mempengaruhi penerimaan perpajakan
- Dibutuhkan tambahan belanja untuk stimulus dan kebutuhan pembiayaan untuk mendanainya

2. Nilai Tukar → akses pada pasar modal global terbatas dan belum pulihnya perdagangan dunia

3. Harga Minyak dan harga-harga komoditas strategis → ketidakpastian terhadap situasi pasar minyak dunia dan komoditas strategis



Risiko Fiskal Tahun 2010 ... (2)

B. Risiko fiskal dari kewajiban kontijensi :

1. Proyek pembangunan infrastruktur:

- Realisasi atas penjaminan Pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW (I dan II), risiko tanah atas jalan tol trans Jawa, jalan tol *Jakarta Outer Ring Road* II (JORR II), dan peningkatan pelayanan air minum sepuluh juta sambungan rumah

2. Bank Indonesia

- Menutup modal Bank Indonesia apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3 persen kewajiban moneter

3. Lembaga Penjamin Simpanan

- Modal awal LPS ditetapkan Rp4 triliun s.d. Rp8 triliun.
Diperlukan penambahan modal LPS, karena terjadi risiko perbankan yang memakan modal

4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

- UU No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI : modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun.
Apabila dibutuhkan tambahan pembiayaan ekspor, maka terdapat kebutuhan tambahan modal LPEI diatas modal sekarang, yakni Rp4 triliun.



Risiko Fiskal Tahun 2010 ... (3)

5. Risiko BUMN

Perubahan kondisi ekonomi makro dan operasional telah memberikan risiko atas PSO dan PMN beberapa BUMN

6. Program pensiun dan tunjangan hari tua (THT) pegawai negeri sipil (PNS)

- jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun, meningkatnya gaji pokok & pensiun pokok PNS; risiko atas gaji Guru dan Dosen
- Program Tunjangan Hari Tua PNS terutama berasal dari *unfunded liability*.

7. Tuntutan hukum kepada pemerintah

- masalah-masalah perdata terkait lelang, pengenaan bea masuk, aset tanah dan/atau bangunan, uji materiil peraturan di bawah undang-undang

8. Keanggotaan pada organisasi dan lembaga keuangan internasional

- Risiko penarikan kontribusi kepada organisasi-organisasi atau lembaga keuangan internasional yang bersifat *callable*

9. Bencana alam

- banjir dan gempa bumi

10. Desentralisasi Fiskal

- Kebijakan pemekaran daerah menambah beban dan kebutuhan dana di APBD otonomi baru atau APBN



Jadwal Pembahasan PPKF dan RAPBN 2010

1. Jadwal pembahasan RAPBN 2010 lebih pendek 1 bulan dari tahun sebelumnya, hari libur Lebaran juga memotong waktu pembahasan
2. Sehubungan dengan itu diusulkan:
 - a) Pembahasan PPKF memuat kesepakatan asumsi makro, penerimaan perpajakan, dan defisit RAPBN 2010
 - b) Target-target PNBP K/L telah dibahas di komisi terkait
 - c) Diperlukan disiplin waktu dalam pembahasan Panja
 - d) Pembahasan Panja A dapat dipersingkat dengan referensi hasil komisi untuk memberi kesempatan pembahasan lebih intensif di panja B dan C



Terima Kasih

